



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA (Periode 2004:03-2009:04)**

TESIS

Oleh:

Haryadi

0606024781

**JURUSAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
PROGAM PASCASARJANA KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
UNIVERSITAS INDONESIA**

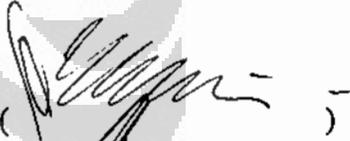
2009

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Haryadi
 NPM : 0606024781
 Program Studi : Timur Tengah dan Islam
 Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
 Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia
 (Periode 2004:3-2009:04)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D ()
 Pembimbing : Dr. Muhammad Muslich, MBA ()
 Penguji : Ranti Wiliasih, M.Si ()
 Pembaca Ahli/Reader : Hardius Usman, S.Si, M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 18-07-2009

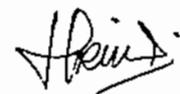
BIODATA

Nama Lengkap : Haryadi
Tempat Tgl Lahir : Batang Linjuang, 1 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan BUMN

PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun	Pendidikan
1	1981-1987	SD Inpres 6/75 Tanjung Bunga
2	1987-1990	SMP N 2 Suliki
3	1990-1993	SMA 2 Payakumbuh
4	1993-1997	DIII Politeknik Universitas Andalas Padang
5	2001-2004	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6	2007-2009	Pascasarjana PSTTI Universitas Indonesia

Jakarta, 18-07-2009



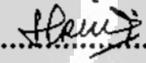
(Haryadi)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

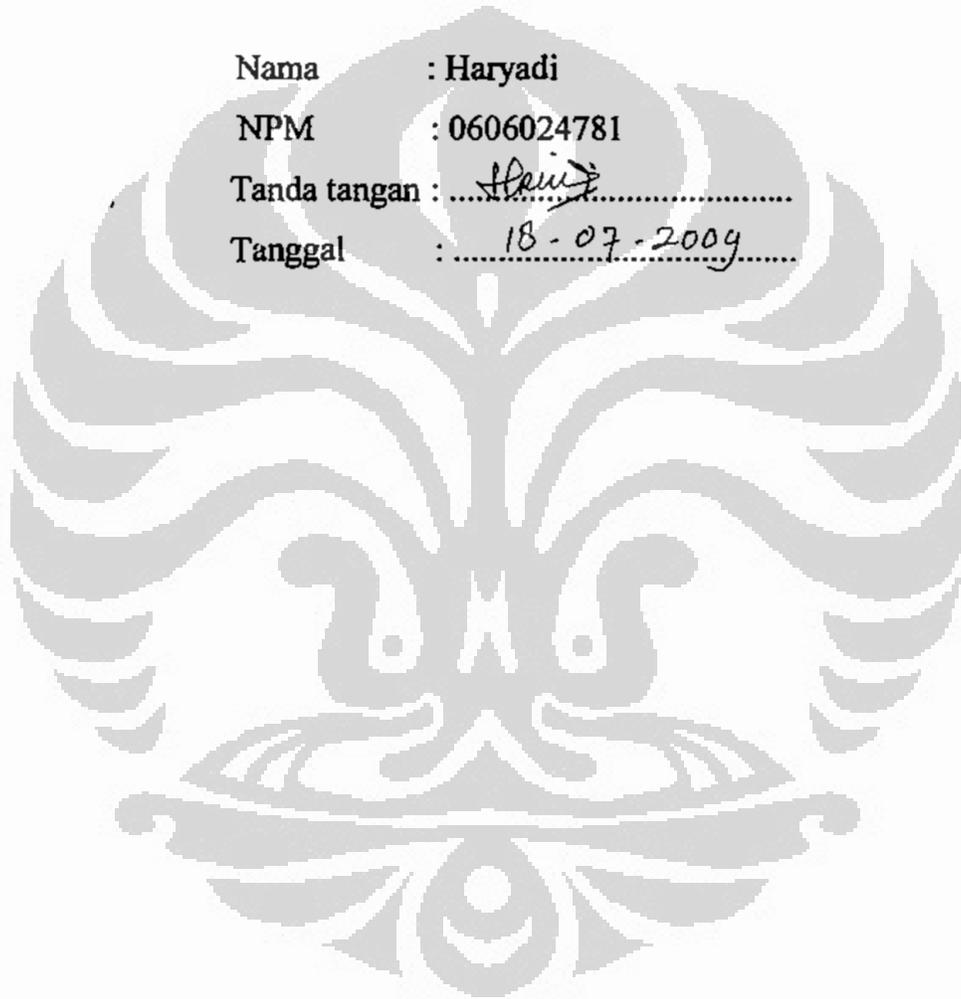
Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Haryadi

NPM : 0606024781

Tanda tangan : 

Tanggal : 18-07-2009



**Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir
Untuk Kepentingan Akademis**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Haryadi
NPM : 0606024781
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (Periode 2004:03-2009:04)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 18-07-2009

Yang menyatakan



(Haryadi)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Segala puji bagi Allah Yang mengadakan dan Yang mengembalikan makhluk-Nya, Yang Maha Membuat apa yang Dia kehendaki. Pemilik arsy yang agung Pemberi ancaman siksa yang pedih, Pemberi petunjuk kepada hamba-hamba pilihan-Nya menuju aturan (*manhaj*)-Nya yang lurus dan “jalan” yang kokoh. Pemberi nikmat kepada mereka setelah menyatakan *syahadat tauhid* dengan memelihara akidah mereka dari kegelapan akibat keraguan dan kebimbangan. Pembimbing mereka untuk mengikuti jejak rasul pilihan-Nya Muhammad saw. Dan berpijak kepada perilaku sahabatnya yang mulia dan dimuliakan dengan diteguhkan dan diluruskan, Yang tampak jelas bagi mereka dalam Dzat dan pekerjaan-pekerjaan (*Af'al*)-Nya dengan keindahan Sifat-sifat-Nya yang hanya bisa dipahami oleh orang yang telah diberi kemampuan “mendengar” dan bisa “menyaksikan”. Dia adalah tunggal dalam Dzat-Nya, lagi Maha Esa dan tidak bersekutu, sendiri tiada banding menjadi sandaran segala makhluk yang tiada tanding, Dia *Qodim* tiada yang mengawali, Azali tiada awal Langgeng Kekal Yang Tiada berujung, Berjaga dan selalu berbuat tiada henti, Berdiri sendiri tiada putus, dan senantiasa disifati dengan sifat-sifat keagungan, tiada berhenti dan terpenggal dengan terputusnya abab dan bergantinya masa. Dia-lah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Nyata dan Yang Batin dan Dia Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu.

Tesis ini telah selesai dibuat berkat petunjuk dan bimbingan-Nya, sungguh suatu kenikmatan yang tiada terkira atas pemberian-Nya, yang patut senantiasa untuk disyukuri dengan harapan tiada mengecewakan-Nya sehingga ditambahkan kenikmatan-Nya. Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk mendapatkan gelar Magister Sains bagi penulis. Tesis yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia**” (Periode 2004:03-2009:04) secara substantif adalah berisikan tentang bagaimana dan apakah yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan yang dialokasikan oleh/dari bank-bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada pada perbankan syariah di Indonesia kepada masyarakat. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan *Non Performing Financing* ternyata

ternyata setelah diteliti memiliki hubungan positif dan mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada masyarakat. Dengan hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat membantu perbankan syariah di Indonesia, pemerintah dan juga masyarakat dapat mengambil banyak manfaat darinya, sehingga dunia ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Tesis penulis selesai juga berkat dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan tesis penulis, penulis ucapkan banyak trimakasih, sekali lagi karena atas jasa dan perhatiannya yang dengan tulus diberikan kepada penulis dari proses penulisan/penyusunan sampai akhir yang dicapai dan yang telah terselesaikan. Akhirnya pihak-pihak tersebut adalah :

1. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D selaku Pimpinan PSTTI UI
2. Dr. Muhammad Muslich selaku Wakil pimpinan PSTTI UI dan Dosen Pembimbing Tesis Penulis
3. Handi Riza , M.Si dan Ibu Ranti Wiliasih, M.Si selaku dosen penguji tesis penulis
4. Hardius Usman, S.Si. M.Si selaku Dosen Pembaca ahli dan penguji tesis penulis.
5. Isteriku tercinta dr. Yenni Hartuti yang selalu mendampingi dan dengan sabar memberi semangat agar tesis ini dapat diselesaikan.
6. Orangtuaku tercinta serta mertuaku terimakasih atas kasih sayang dan limpahan cinta serta dukungan yang engkau berikan kepada Ananda penulis yang dengan sabar, selalu berdoa dan memberikan segenap daya upaya serta kemampuannya untuk bisa menyekolahkan dan mendidik Ananda penulis sampai dewasa, jasa-mu yang besar tiada dapat Ananda ganti dengan apapun, tapi usaha membalas jasa-mu akan senantiasa Ananda usahakan walaupun tak sebanding dengan pengorbanan yang telah engkau berikan.
7. Anakku tercinta Syifa Azzahra yang menjadi belahan jiwa dan penyemangat penulis agar bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Adik-adikku tercinta Rini Hariani, SKom dan Sri Hildayati yang selalu memberikan dukungan dan doa agar tesis ini berhasil di wujudkan.
9. Selanjutnya tidak lupa rekan-rekan sesama mahasiswa pasca sarjana PSTTI UI khususnya mbak Hendrayani, mbak Lusi yang dengan senang hati memberikan bantuan pencarian data dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

10. Para Dosen pengajar dan karyawan sekretariat PSTTI UI

11. dan seluruh teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan secara individu yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

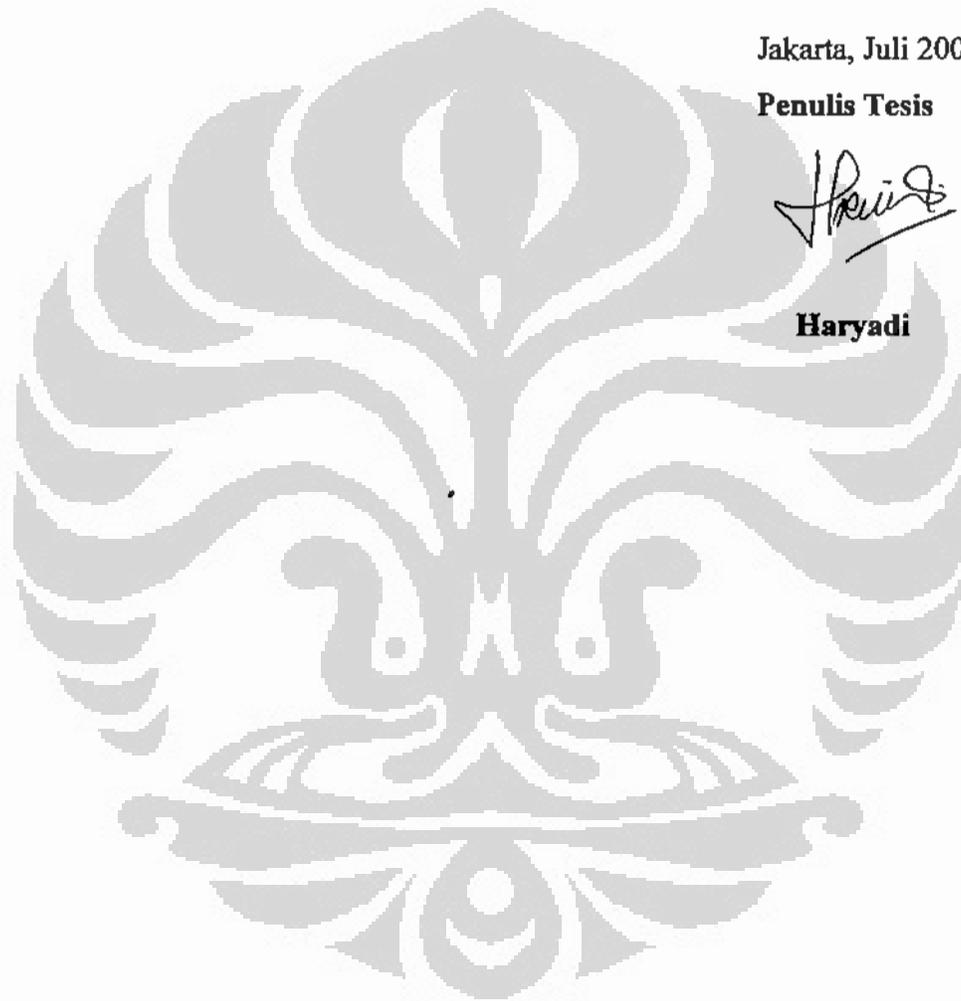
Atas semua dukungannya selama ini penulis dengan tulus ikhlas mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT membalas setiap amal ibadah kita Amiin Ya Robbal'alamin.

Jakarta, Juli 2009

Penulis Tesis



Haryadi



ABSTRAK

Untuk mencapai program akselerasi perbankan syariah, Bank Indonesia telah menargetkan agar perbankan syariah diakhir tahun 2008 dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp.68.950.000.000.000,- tapi ternyata realisasinya hanya bisa dipenuhi sebesar Rp.38.195.000.000.000,- atau hanya tercapai sebesar 55%nya sehingga perlu penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan *Multiple Linier Regression* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) guna bisa memberikan solusi bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Variabel-variabel independen yang digunakan adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), *Non Performing Financing* (NPF), *equivalent rate* pembiayaan (ERPYD), *equivalent rate* Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan tingkat inflasi Indonesia (Inflasi) yang kesemuanya dari sisi kebijakan moneter dan perbankan, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Pembiayaan yang diberikan (PYD). Hasilnya menunjukkan bahwa SWBI dan NPF mempengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan *equivalent rate* pembiayaan, *equivalent rate* dana pihak ketiga dan tingkat inflasi, ternyata tidak signifikan mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Pembiayaan, SWBI, NPF, *Equivalent Rate* Pembiayaan, *Equivalent Rate* DPK, Inflasi

ABSTRACT

In order to achieve the *sharia* banking acceleration program, Bank of Indonesia has targeted that by the end of 2008 the *sharia* banking should channel a total finance of Rp 68,950,000,000,000, however, the realization was only Rp 38,195,000,000,000 or only around 55 % of the target. Thus, it is important to analyze the factors affecting the financing provided by *sharia* banking in order to provide solutions for the development of *sharia* banking in Indonesia. This study used *Multiple Linier Regression* with OLS (*Ordinary Least Square*) method.

The independent variables were *Wadiah Certificate* of Bank of Indonesia (SWBI), Non Performing Financing (NPF), equivalent rate financing (ERPYPD), equivalent rate of the third party (ERDPK), and inflation rate of Indonesia that were from the monetary and banking policy side, while the dependent variable was the given financing (PYD). The result showed that SWBI and NPF affected the given financing significantly. Meanwhile, ERPYPD, ERDPK, and inflation rate did not significantly affect the financing provided by *sharia* banking in Indonesia.

Keywords: *Financing, SWBI, NPF, Equivalent Rate Financing, Equivalent rate of the third party, Inflation rate*

اختصار

للحصول على أهداف وغايات البنوك الشرعية في إندونيسيا, فإن بنك اندونيسيا وضع خطوته لها على أن تقدر البنوك الشرعية تمويل مشروعها في إندونيسيا ما يبلغ حول 68.950.000.000.000 روبية في عام 2008 والواقع أن البنوك الشرعية تقدر تمويل المشروع حول 38.195.000.000.000 روبية أو حصلت البنوك الشرعية على 55 في المئة فقط. وبالتالي لا بد من عملية البحث والاطلاع على تحليل المؤثرات التي تؤثر على تمويل في البنوك الشرعية في إندونيسيا مع استخدام التحليل المتعددة ومع استخدام تحليل اقتصاد معين وذلك من أجل وجود الحل في تطوير البنوك الشرعية في الدولة.

العلاقات الاستقلالية المستخدمة في البحث هي وثيقة ودائع بنك اندونيسيا, تمويل غير رسمية, معدل القيمة, تمويل, ورتبة التضخم المالي وكلها من أنظمة النقدية والبنوك, وأما من العلاقات الداخلية هي التمويل المعد. دلت نتيجة البحث على أن علاقة وثيقة ودائع بنك اندونيسيا و تمويل غير رسمية لها تأثير بالغ على التمويل المعد. وأما معدل القيمة, تمويل, ورتبة التضخم المالي ليست لها تأثير بالغ على التمويل في البنوك الشرعية في إندونيسيا .

الكلمات المفتاحية : تمويل, وثيقة ودائع بنك اندونيسيا, تمويل غير رسمية, معدل القيمة, تمويل, التضخم المالي.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyaluran pembiayaan atau kredit dari perbankan syariah secara nasional untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah kepada nasabah pada tahun 2008 telah mencapai sebesar Rp. 38.195.000.000.000,- (tiga puluh delapan triliun seratus sembilan puluh lima milyar rupiah) untuk membiayai berbagai pembiayaan di masyarakat baik pembiayaan produktif maupun yang bersifat konsumtif atau meningkat sebesar 37% dibanding tahun 2007. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2007) mengenai kebijakan pengembangan perbankan Syariah tahun 2007-2008 ada beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya :

1. Kebijakan *dual banking system* pada tahun 1992 masih belum tercermin dalam realitas karena dalam kenyataan karena sampai saat ini pangsa pasar bank syariah belum signifikan (Oktober 2006 :1,5%).
2. Survey preferensi (2000-2005) menunjukkan potensi pasar bank syariah domestik) yang cukup besar ditambah dengan perkembangan yang pesat perbankan/keuangan syariah internasional.
3. Industri perbankan secara nasional masih menghadapi permasalahan mengoptimalkan fungsi intermediasi. Selain itu Bank Indonesia memiliki komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (PDB growth 6%) dimana sektor perbankan nasional menjadi motor penggeraknya

Sehingga dari hal-hal tersebut diatas maka dalam rangka akselerasi perbankan syariah, Bank Indonesia di tahun 2008 telah menargetkan agar perbankan Syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang ditargetkan sebesar Rp.68.950.000.000.000,- tapi ternyata realisasinya hanya bisa dipenuhi sebesar Rp.38.195.000.000.000,- atau hanya tercapai sebesar 55%nya.

Berdasarkan kepentingan di atas Penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan dengan penelitian ini semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengannya dapat memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya. Penelitian ini oleh penulis dijadikan sebagai tesis dengan judul

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia (periode 2004:03-2009:04)”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum mampunya perbankan syariah mencapai target penyaluran pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ditahun 2008. Sehingga perlu penelitian faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia agar bisa dipakai oleh pihak yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna mendorong agar perbankan syariah khususnya dalam penyaluran pembiayaan bisa lebih optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Non Performing Financing, Equivalent Rate* Pembiayaan Yang diberikan, *Equivalent Rate* DPK dan tingkat inflasi di Indonesia terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi kurun waktunya dari bulan Maret 2004 sampai dengan bulan April 2009. Sedangkan variabel yang diteliti pun hanya dibatasi pada variabel: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), *Non Performing Financing* (NPF), *Equivalent Rate* Pembiayaan yang diberikan, *Equivalent Rate* Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Inflasi.

Hipotesis yang dapat disebutkan dalam penelitian ini terkait dengan pertanyaan penelitian yaitu :

HO: Faktor SBWI, NPF, Inflasi, *equivalent rate* pembiayaan, *equivalent rate* DPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

HI : Faktor SBWI, NPF, Inflasi, *equivalent rate* pembiayaan, *equivalent rate* DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekumpulan data yang dihimpun berupa data Pembiayaan yang diberikan secara nasional selama periode Maret 2004 s/d April 2009, serta data-data yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan yang diberikan yaitu data SWBI, NPF, *Equivalent Rate* Pembiayaan, *Equivalent Rate* DPK dan Inflasi yang diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Penelitian akan difokuskan pada penyaluran pembiayaan pada perbankan Syariah diluar BPRS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan adalah dengan menggunakan pengolahan data secara statistik yaitu *Multiple Linier Regression* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dari data perbankan nasional selama kurun waktu Maret 2004 sampai April 2009.

Hasil analisis dan pengolahan data menunjukkan adanya autokorelasi pada proses awal. Setelah autokorelasi teratasi maka diketahui bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia sehingga apabila bonus SWBI naik maka penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah juga akan tetap naik.

Sementara itu variabel *Non Performing Financing* (NPF) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sehingga apabila tingkat NPF naik maka penyaluran pembiayaan juga akan naik.

Sedangkan *Equivalent rate* Pembiayaan, *Equivalent Rate* Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Inflasi ternyata tidak signifikan mempengaruhi penyaluran pembiayaan

pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah saat ini benar-benar berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang diharapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Dari hasil pengolahan dan pengujian terhadap variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dapat diperoleh model *Multiple Linier Regression* nya yaitu :

$$\text{Pembiayaan}_2 = 200000000 \text{ NPF}_2 + 1.644 \text{ SWBI}_2$$

$$\text{Dimana : Pembiayaan}_2 = \text{Pembiayaan}_t - 0.581 \text{ Pembiayaan}_{t-1}$$

$$\text{NPF}_2 = \text{NPF}_t - 0.581 \text{ NPF}_{t-1}$$

$$\text{SWBI}_2 = \text{SWBI}_t - 0.581 \text{ SWBI}_{t-1}$$

Sehingga persamaan regresinya adalah :

$$\text{Pembiayaan}_t = 0.581 \text{ Pembiayaan}_{t-1} + 200000000 \text{ NPF}_t - 116200000 \text{ NPF}_{t-1} + 1.644 \text{ SWBI}_t - 0.955 \text{ SWBI}_{t-1}$$

Dari hasil persamaan diatas maka interpretasinya yaitu :

1. Setiap kenaikan penempatan dana perbankan di SWBI sebesar Rp.1 maka akan mengakibatkan naiknya pembiayaan sebesar 1.644 juta rupiah.
2. Setiap kenaikan NPF sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar 200,000,000 juta rupiah

Hasil dari penelitian dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ini bersifat kondisional karena faktor-faktor yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Dari fakta-fakta yang ditemukan maka dapat ditarik sebuah implikasi teoritis darinya yaitu :

1. Jika pemerintah dan Bank Indonesia ingin mempercepat dan mengoptimalkan perkembangan penyaluran perbankan syariah maka bonus SWBI/SBIS saat ini harus bisa lebih menarik lagi sehingga perbankan syariah tidak perlu ragu atau cemas mengalami kelebihan likuiditas dari dana yang terkumpulkan dari masyarakat karena dapat menjaga agar perbankan tetap dapat memberikan bagi hasil yang menarik bagi masyarakat yang menyimpan dananya di perbankan syariah dan kelebihan likuiditas tersebut bisa di simpan sementara waktu di

SWBI/SBIS sambil menunggu penyaluran dana ke sektor riil/masyarakat dapat direalisasikan atau dengan kata lain SWBI/SBIS sebagai alternatif investasi yang sifatnya jangka pendek bagi perbankan syariah. Namun bonus SWBI tersebut jangan terlalu tinggi yang bisa menyebabkan perbankan lebih menyukai menyimpan dananya di SWBI/SBIS dibanding penyaluran ke masyarakat. Sehingga dengan makin banyaknya dana pihak ketiga yang bisa dikumpulkan oleh perbankan syariah maka kapasitas perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dan sektor riil akan makin lebih meningkat lagi.

2. Demikian juga halnya perlunya kerjasama antara perbankan syariah dan pengawasan Bank Indonesia agar tingkat NPF tidak terlalu tinggi karena akan bisa berpengaruh negative terhadap pembiayaan walaupun saat penelitian kenaikan NPF membuat pembiayaan juga juga naik. Sedangkan bagi perbankan syariah harus tetap meningkatkan penyaluran pembiayaan yang berkualitas dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga porsi pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil.

Saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah hendaknya mencoba menggunakan kurun waktu yang lebih lama dan variabel yang diteliti agar ditambah lagi serta di perluas aspek-aspek yang akan diteliti sehingga bisa memberikan masukan yang lebih akurat bagi pengambil keputusan dalam kebijakan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia serta agar perkembangan ilmu pengetahuan makin bertambah maju.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
ختصار.....	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Hipotesis Penelitian.....	19
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.7.1 Desain Penelitian.....	19
1.7.2 Instrumen penelitian.....	19
1.7.3 Jenis Data.....	20
1.7.4 Metode Penelitian.....	21
1.8 Sistematika Penulisan Laporan.....	21
BAB II STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Bank Secara Umum.....	23
2.1.1 Arti dan Fungsi Perbankan.....	23
2.1.2 Penghimpunan Dana Bank	25
2.1.3 Suku Bunga Dana Pihak Ketiga.....	27
2.1.4 Penyaluran Kredit Perbankan.....	28
2.1.5 Suku Bunga Kredit (Pinjaman).....	30

2.2 Inflasi	31
2.3 SWBI	33
2.4 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	35
2.5 Bank Syariah.....	37
2.5.1 Defenisi Bank Syariah.....	37
2.5.2 Perbedaan antara bank syariah dan Bank konvensional.....	38
2.5.3 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	40
2.5.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	41
2.5.5 Sistem Lembaga dan Operasional Bank Syariah.....	43
2.5.5.1 Penghimpunan dana.....	43
2.5.5.2 Penyaluran dana	47
2.6 Penelitian sebelumnya tentang Pelaksanaan penyaluran pembiayaan perbankan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Data.....	58
3.2 Pengujian data.....	59
3.2.1 Uji Normalitas.....	59
3.2.2 Test Asumsi Klasik.....	60
3.2.2.1 Uji Multikolinearitas.....	60
3.2.2.2 Uji Heterokedastisitas.....	61
3.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	63
3.2.3 Pengujian Hipotesis	64
3.2.3.1 Analisis Varian (Uji F).....	64
3.2.3.2 Uji t.....	66
3.2.4 Pemilihan Model.....	67
3.2.4.1 Koefisien Determinasi Majemuk (R^2).....	67
3.3 Model Multiple Linier Regression.....	68
3.3.1 Interpretasi Model/parameter.....	69

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Kinerja Variabel Penelitian...	71
4.1.1 Perkembangan kinerja variable pembiayaan perbankan syariah.	71
4.1.2 Perkembangan kinerja variabel SWBI	72
4.1.3 Perkembangan variabel NPF	74
4.1.4 Perkembangan variabel <i>equivalent rate</i> pembiayaan.....	75
4.1.5 Perkembangan variabel <i>equivalent rate</i> DPK.....	76
4.1.6 Perkembangan variabel Inflasi.....	77
4.2.1 Uji Normalitas.....	78
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	80
4.2.2.1 Uji Multikolinieritas.....	80
4.2.2.2 Uji Hetrokedastisitas.....	81
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	84
4.2.3 Pengujian Hipotesis	87
4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)	87
4.2.3.2 Uji Simultan	88
4.2.3.3 Signifikansi Koefisien Regresi	88
4.3 Interpretasi / Evaluasi Koefisien Hasil	
<i>Multiple Linear Regression</i>	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	96
5.3 Saran untuk penelitian selanjutnya	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	L-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah.....	2
Tabel 1.2 Proyeksi Kinerja Perbankan Syariah Nasional di Luar BPRS	10
Tabel 1.3 Kinerja Perbankan Syariah Nasional di luar BPRS.....	10
Tabel 2.1 Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.....	39
Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan bagi Hasil.....	45
Tabel 2.3 Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	51
Tabel 2.4 Penyaluran Dana Bank Syariah	52
Tabel 3.1 Pengambilan keputusan untuk autokorelasi.....	64
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.2 Pengujian Heterokedastisitas.....	83
Tabel 4.3 Model <i>Summary</i>	84
Tabel 4.4 <i>Cofisients Lagres 2</i>	85
Tabel 4.5 Keputusan Autokorelasi.....	86
Tabel 4.6 Pengujian Autokorelasi.....	86
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi.....	87
Tabel 4.8 Anova	88
Tabel 4.9 Pengujian Hipotesis.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah	2
Gambar 1.2 Pertumbuhan Aset BS, DPK BS, DPK BK dan tingkat Suku Bunga	3
Gambar 1.3 Perkembangan perbankan Syariah (Aset, PYD, DPK) Dan kinerja variabel makroekonomi (PYD, Konsumsi, dan Inflasi)...	4
Gambar 1.4 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah.....	6
Gambar 1.5 Diagram alur Pemikiran Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	18
Gambar 2.1 Diagram Kegiatan Bank	25
Gambar 2.2 Skema <i>Wadi'ah</i>	44
Gambar 2.3 Skema <i>Mudharabah</i>	44
Gambar 2.4 Skema <i>Musyarakah</i>	49
Gambar 2.5 Skema <i>Murabahah</i>	50
Gambar 2.6 Skema <i>Ijarah</i>	51
Gambar 2.7 Pencatatan Laporan Konsolidasi Bank	54
Gambar 4.1 Perkembangan pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode Maret 2004-Maret 2009.....	72
Gambar 4.2 Pergerakan SWBI periode Maret 2004 – Maret 2009	73
Gambar 4.3 Perkembangan NPF periode Maret 2004 – Maret 2009.....	74
Gambar 4.4 Perkembangan <i>equivalent rate</i> pembiayaan perbankan syariah Periode Maret 2004-Maret 2009.....	75
Gambar 4.5 Perkembangan <i>equivalent rate</i> DPK perbankan syariah Periode Maret 2004-Maret 2009.....	76
Gambar 4.6 Perkembangan Inflasi Periode Maret 2004-Maret 2009.....	77
Gambar 4.7 <i>Regression Standard Residual</i>	78
Gambar 4.8 Grafik Histogram.....	79
Gambar 4.9 <i>Scatter Plot</i>	82
Gambar 4.10 Hasil uji Autokorelasi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank menghimpun simpanan uang masyarakat (dana pihak ketiga). Kemudian uang atau dana tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan pengenaan suku bunga tertentu. Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya. Pendapatan ini diperoleh dari spread suku bunga simpanan dan kredit yang dikenakan oleh bank. Penentuan *spread* ini tergantung dari pihak bank dan target marketnya (Kurniawan, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Lembaga keuangan Islam termasuk perbankan menjadi intermediasi keuangan dengan cara yang sangat berbeda dari bank konvensional, karena ia sangat menonjolkan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS) dalam pembiayaan dan investasi perdagangan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan bank syariah, dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Menurut laporan Bank Indonesia, jumlah bank syariah yang beroperasi sejak 1998 meningkat cukup signifikan. Pada 1998 bank umum syariah baru sebuah, kantor cabang 10, kantor cabang pembantu sebuah, dan kantor kas yang

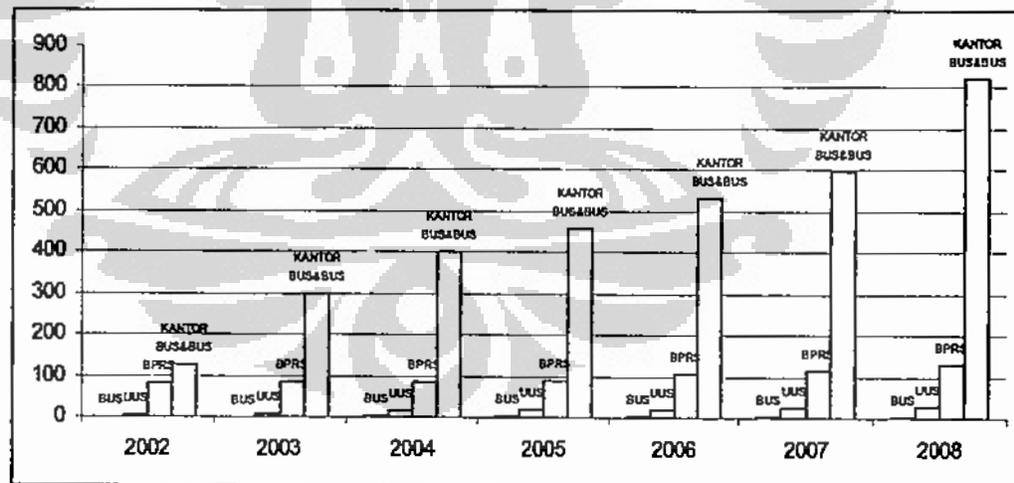
beroperasi 19. Selama tahun 2008 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami penambahan 2 Bank Umum Syariah (BUS) 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 17 BPRS, sehingga pada akhir 2008 terdapat 5 BUS, 27 UUS dan 131 BPRS. Sejalan dengan hal tersebut, jaringan kantor bank syariah, termasuk layanan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 953 kantor dan 1.470 layanan syariah. Data yang penulis kumpulkan juga dari Bank Indonesia mengenai perkembangan perbankan syariah dari tahun 2002 sampai tahun 2008 adalah sesuai Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Bank Umum Syariah	2	2	3	3	3	3	5
Unit Usaha Syariah	6	8	15	19	20	26	27
BPRS	83	84	86	92	105	114	131
Jumlah Kantor BUS & UUS	127	299	401	458	532	597	822

Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah



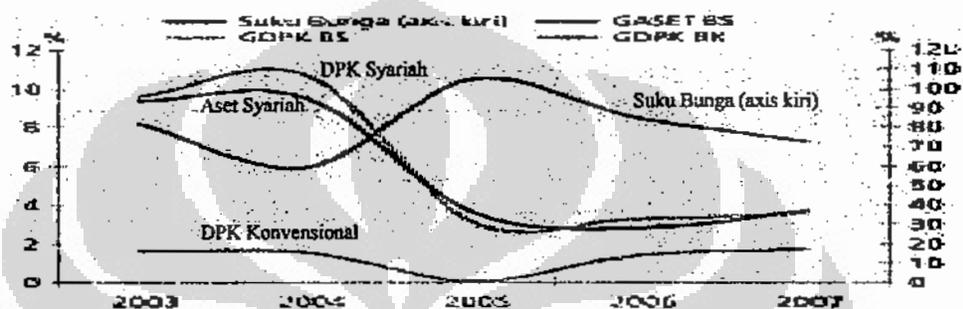
Sumber : Bank Indonesia

Dari Gambar 1.1 dan Tabel 1.1 diatas terlihat perkembangan kuantitas kelembagaan perbankan syariah dari tahun ke tahun terlihat sangat pesat dan

diharapkan dengan perkembangan ini pelayanan perbankan syariah dalam berpartisipasi dalam perekonomian nasional akan makin besar.

Pengaruh tingkat equivalent rate DPK mempengaruhi pengumpulan DPK dan aset perbankan syariah seperti Gambar 1.2 berikut :

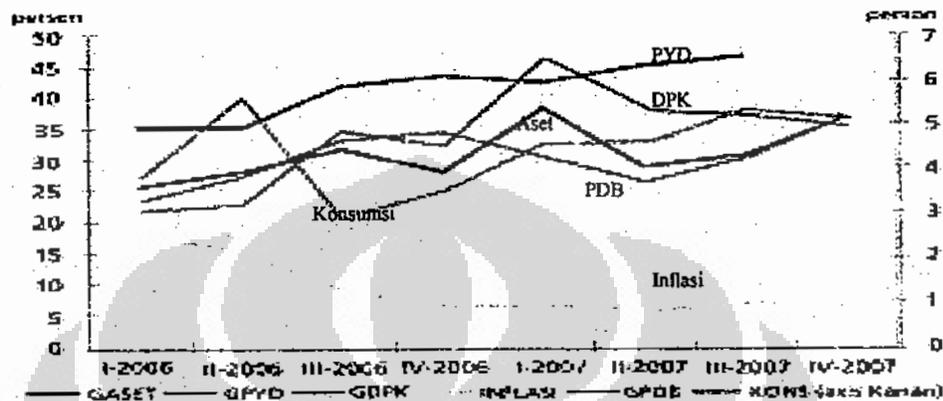
Gambar 1.2
Pertumbuhan Aset BS, DPK BS, DPK BK dan tingkat suku bunga



Sumber : Bank Indonesia

Dari Gambar 1.2 diatas menunjukkan pertumbuhan Aset Bank Syariah, DPK Bank Syariah, DPK Bank Konvensional dan perkembangan tingkat suku bunga. Gambar 1.2 ini memperlihatkan bahwa perkembangan di tahun 2007 semakin mempertegas korelasi negatif antara fluktuasi tingkat suku bunga perbankan dengan fluktuasi DPK perbankan syariah. Artinya kondisi suku bunga yang meningkat akan menekan pertumbuhan DPK (termasuk aset) perbankan syariah begitu pula sebaliknya, jika suku bunga cenderung turun DPK bank syariah akan meningkat karena nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan suku bunga perbankan secara umum.

Gambar 1.3
Perkembangan perbankan Syariah (Aset, PYD, DPK) dan kinerja variabel
makroekonomi (PYD, Konsumsi, dan Inflasi)



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.3 menjelaskan bagaimana kinerja ekonomi sektor riil mempengaruhi secara positif perkembangan industri perbankan syariah, misalnya kecenderungan penurunan inflasi mendorong peningkatan aset perbankan syariah.

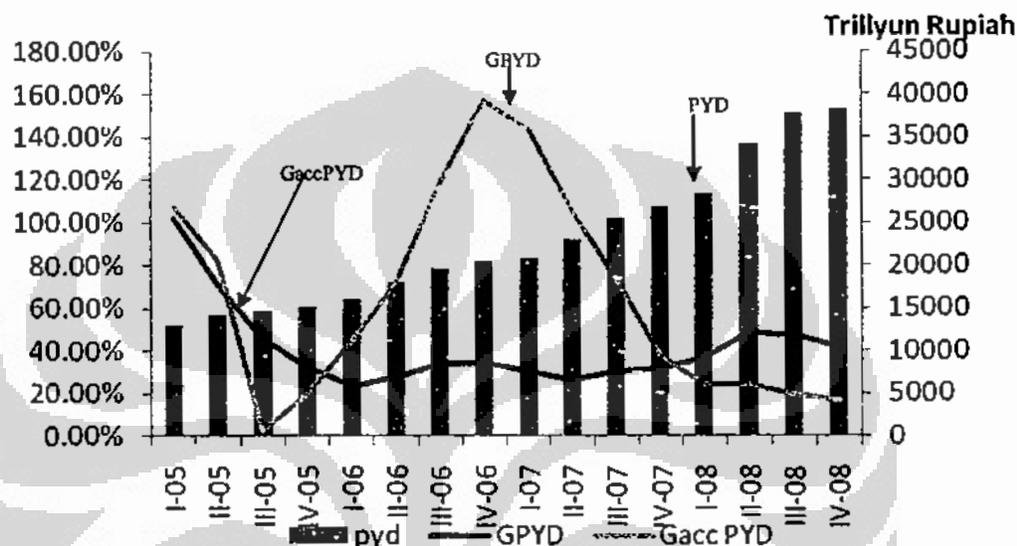
Dalam hal penyaluran dana, tahun 2007 industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 36,7 persen (*y-o-y*) dibandingkan dengan perbankan nasional yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,8 persen, dengan posisi pangsa pembiayaan terhadap perbankan secara nasional mencapai 2,8 persen. Pertumbuhan pembiayaan ini relatif masih mendekati angka proyeksi berdasarkan yang diperhitungkan pada akhir tahun lalu. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada dasarnya juga merupakan respon dari membaiknya sektor ekonomi riil yang didorong oleh semakin kondusifnya tingkat suku bunga. Namun kecenderungan turunnya suku bunga pembiayaan ini perlu dicermati. Dalam kondisi di mana profil nasabah pembiayaan bank syariah masih sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, maka penurunan suku bunga kredit akan menimbulkan tekanan bagi perbankan syariah.

Pada semester kedua mengakhiri tahun 2008, pertumbuhan aset industri perbankan syariah cenderung mengalami perlambatan terutama sejak triwulan kedua, meskipun menunjukkan pertumbuhan aset yang positif. Terpuruknya ekonomi dunia akibat krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat dan ketatnya kredit/liiquiditas global yang semakin serius pada semester akhir 2008 mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi Indonesia, seperti nilai tukar, suku bunga dan kinerja pasar modal. Kondisi tersebut ditengarai sebagai penyebab perlambatan aktifitas ekonomi riil domestik Indonesia. Selanjutnya pengaruh tersebut relatif menyebabkan perlambatan pertumbuhan di industri perbankan syariah di Indonesia, meskipun tidak separah industri keuangan secara umum.

Kondisi global tersebut mengakibatkan iklim investasi yang belum kondusif, meningkatnya inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan biaya ekonomi yang cukup tinggi. Dengan adanya beberapa kondisi makro tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan indikator secara mikro di perbankan, seperti pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang melambat, meningkatnya margin dan persentase nisbah pembiayaan seiring dengan meningkatnya laju inflasi, sehingga berdampak pula terhadap pengetatan penyaluran pembiayaan terutama sejak Triwulan ke tiga tahun 2008.

Sementara itu penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2008 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6 persen dari triwulan keempat tahun 2007 atau menjadi 42,05 persen pada triwulan keempat tahun 2008, meskipun kondisi di tahun 2008 tersebut mengalami perlambatan sejak posisi pada Triwulan ke II sebesar 51 persen. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp38,19 triliun. Pertumbuhan jumlah pembiayaan yang tidak didukung dengan pertumbuhan DPK secara signifikan menyebabkan *financing to deposit ratio* (FDR) mencapai level diatas 104 persen pada tahun pelaporan (lihat Gambar 1.4.)

Gambar 1.4
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber : Bank Indonesia

Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, juga diikuti oleh peningkatan kualitas pembiayaan perbankan syariah dari seluruh portfolio pembiayaan pada tahun 2008. Peningkatan kualitas ini tercermin dari penurunan persentase *non performing financing* (NPF) gross pada tahun 2008, dimana pada posisi tahun 2007 NPF perbankan syariah mencapai 4,07 persen. Penurunan NPF tersebut disebabkan oleh proses restrukturisasi, *write off* dan pengambil alihan pembiayaan oleh Bank lain (*take over*). Prestasi tersebut harus selalu diupayakan untuk selalu dipertahankan dan terus ditingkatkan sejalan dengan perbaikan kualitas ekposur dalam sistem perbankan secara nasional.

Kualitas pembiayaan perbankan syariah mampu dijaga dalam rasio yang relatif rendah. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun laporan turun menjadi 3,95 persen. Peningkatan pembiayaan pada produk berbasis bagi hasil, khususnya dengan akad *musyarakah*, yang berisiko lebih tinggi dan krisis

keuangan global tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah. Rasio NPF dapat dijaga dalam kisaran yang rendah di bawah 5 persen.

Seiring penggantian SWBI dengan SBIS, posisi penempatan perbankan syariah pada OPT Syariah terus menurun. Terdapat 2 (dua) faktor penyebab fenomena tersebut yaitu penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditas dan pola musiman pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Penutupan SWBI yang sebelumnya tersedia setiap hari menyebabkan berubahnya pola ketersediaan (pasokan) likuiditas harian dari SWBI jatuh tempo, sementara lelang SBIS hanya dilakukan secara mingguan dengan tenor 1 (satu) bulan. Hal ini mendorong perbankan syariah untuk memelihara excess reserve dengan jumlah lebih besar yang tercermin dari peningkatan jumlah excess reserve dari rata-rata Rp276,7 miliar (sebelum penutupan SWBI) menjadi Rp 690,4 miliar (setelah penutupan SWBI). Selain itu, pola musiman pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang dimulai antara akhir kuartal I dan awal kuartal II menyebabkan pemeliharaan alat-alat likuid (termasuk SBIS) cenderung menurun.

Meski demikian, menyimak kondisi sekarang dengan *share* bank syariah masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional, tentunya peran ideal bank dan lembaga keuangan syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas belum akan begitu terasa. Dalam kondisi seperti ini, salah satu elemen pokok dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pemerintah (*regulator*), perlu mengambil alih dan memegang peranan kunci perekonomian dengan didukung oleh kalangan perbankan syariah itu sendiri.

Dari sisi lain prestasi yang perlu dicatat, selama ini bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi perbankan yang lebih besar. Artinya, proses dan keterlibatan dalam pembiayaan dan pembinaan nasabah lebih intens dibanding dengan bank konvensional. Menurut data statistik BI di beberapa media menunjukkan peranan intermediasi bank konvensional lebih rendah. Ini bisa dilihat dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank konvensional yang hanya sekitar 50 persen, sedangkan rata-rata LDR atau FDR (*Financing to Deposit Ratio*) bank syariah melebihi 100 persen. Angka LDR bank syariah yang tinggi akhir-akhir ini

bisa diartikan bahwa bank syariah lebih mampu mendorong angka percepatan perputaran uang dan investasi yang diharapkan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hanya dari segi jumlah pembiayaan masih rendah.

Di tahun 2008, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen (semula 6,8 persen). Pertumbuhan 6,4 persen tersebut terutama diharapkan dari pertumbuhan investasi. Berdasarkan prospek kondisi makroekonomi Indonesia tersebut, maka dapat diprediksikan pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun depan masih akan menikmati *high-growth* dibandingkan pertumbuhan perbankan secara nasional. Kondisi pertumbuhan ekonomi secara umum akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuannya dalam melakukan konsumsi dan *saving* (tabungan). Pada saat yang sama kapasitas perbankan untuk melakukan pembiayaan sektor riil banyak dipengaruhi oleh besarnya dana masyarakat yang mampu diserap dalam bentuk tabungan.

Perbankan syariah sempat terhambat perkembangannya karena kebijakan BI Rate yang tinggi selama periode 2005-2006. Kebijakan *office channeling* menjadi andalan BI mengakselerasi perbankan syariah ke depan. Berbagai tantangan berat dihadapi industri perbankan syariah nasional sepanjang 2006, khususnya berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang ditandai oleh relatif tingginya tingkat suku bunga dan inflasi.

Meski demikian, perbankan syariah berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya 12,92 persen dari akhir 2005 hingga Agustus 2006 atau melebihi laju pertumbuhan industri perbankan nasional yang 5,55 persen. Namun, proyeksi pangsa aset perbankan syariah menjadi 1,70 persen pada akhir 2006 tampaknya tidak mudah tercapai. Pasalnya, hingga Agustus 2006 baru tercapai 1,55 persen atau senilai Rp23,58 triliun. Artinya, sepanjang 2006, ruang gerak perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya mengalami keterbatasan, terutama dalam pengumpulan dana pihak ketiga (DPK).

Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut diatas adalah langkah Bank Indonesia (BI) yang terpaksa memperketat kebijakan moneternya ditandai dengan BI Rate yang tinggi sejak tahun lalu hingga saat ini. Akibat kebijakan tersebut,

risiko *displacement* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) meningkat. Terbukti, DPK perbankan syariah sempat menurun pada Januari dan Februari 2006. Di sisi lain, sejak BI mengeluarkan kebijakan *office channeling* (OC), tampaknya DPK perbankan syariah juga mulai menggeliat kembali. Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan Direktorat Perbankan Syariah BI per Agustus 2006, DPK perbankan syariah hingga Agustus 2006 meningkat menjadi Rp17,11 triliun atau tumbuh 9,82% dari posisi DPK per Desember 2005.

Kebijakan dan strategi pengembangan perbankan syariah dari Bank Indonesia tahun 2007 difokuskan pada upaya mempercepat peningkatan kapasitas pelayanan perbankan syariah. Upaya ini akan dilakukan dari sisi penawaran dan permintaan guna mencapai target pangsa 5 persen dari total volume perbankan nasional diakhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dari sisi penawaran, kebijakan perbankan syariah akan diarahkan untuk memperkuat struktur kelembagaan dan efisiensi perbankan syariah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mampu meredam berbagai kejutan ekonomi yang terjadi. Dari sisi permintaan, kebijakan perbankan syariah akan diarahkan untuk dapat memperluas pangsa pasar perbankan syariah ditengah masyarakat, sehingga peran perbankan syariah dalam mendorong proses intermediasi perbankan dan penciptaan stabilitas sistematis semakin signifikan.

Berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, diproyeksikan pertumbuhannya melalui akselerasi adalah seperti Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Proyeksi Kinerja Perbankan Syariah Nasional di Luar BPRS
(Dalam Milyar Rupiah)

INDIKATOR	2005	2006	2007(AKSELERASI)	2008(AKSELERASI)
Aset	20.880	27.140	47.940	91.570
Pembiayaan yang diberikan	15.231	20.445	38.390	68.950
Dana Pihak Ketiga	15.580	20.250	36.100	73.330
Market Share	1,42%	1,68%	2,84%	5,25%

Sumber : Bank Indonesia

Sedangkan realisasi kinerja perbankan Syariah nasional tersebut adalah sesuai dengan Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Kinerja Perbankan Syariah Nasional di luar BPRS
(Dalam Milyar Rupiah)

INDIKATOR	2005	2006	2007	2008
Aset	20.880	27.140	36.537	47.179
Pembiayaan yang diberikan	15.231	20.445	27.944	38.195
Dana Pihak Ketiga	15.582	20.672	28.011	36.852
Market Share	1,42%	1,68%	1,76%	2,05%

Sumber : Bank Indonesia

Melihat hal diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia yang perkembangannya makin cepat dengan demikian layak untuk diteliti. Jika tidak ada penelitian tentangnya dikhawatirkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ke masyarakat yang sangat penting berkontribusi bagi perekonomian ini ketika terjadi problem, kendala yang menghambat penyaluran perbankan syariah tidak dapat diketahui apa penyebab sebenarnya, sehingga tidak mampu untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan kepentingan di atas maka perlu penelitian dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan dengan penelitian ini semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengannya dapat memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya. Penelitian ini dijadikan sebagai tesis dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (periode Maret 2004-April 2009)”**

1.2 Perumusan Masalah

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia makin optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak pada pembangunan nasional diantaranya adalah :

1. RUU perbankan syariah yang telah mengalami perubahan status menjadi UU perbankan syariah yaitu undang-undang No.21 tahun 2008 yang berpengaruh pada Bank Indonesia yang melakukan beberapa revisi peraturan agar dapat disesuaikan dengan undang undang sehingga kedudukan perbankan syariah lebih kuat secara legal(www.bi.go.id, 2008)
2. Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/7/PBI/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang perubahan atas peraturan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Bank umum dimana salah satunya mengatur tentang penyempurnaan pengembangan jaringan Bank syariah

melalui Office Channelling sehingga perbankan konvensional dapat melayani transaksi syariah (www.bi.go.id, 2007)

3. Adanya dorongan dari Bank Indonesia yang mempermudah dan memperbanyak layanan syariah, memperbanyak pembukaan kantor cabang, termasuk konversi dari unit syariah menjadi bank syariah serta meringankan modal pendirian bank syariah (www.bi.go.id, 2008).
4. Akan adanya draf undang-undang mengenai perbankan syariah dimana kata-kata jual beli dihilangkan dan diganti dengan pembiayaan dengan aset murabahah sehingga efek pengenaan PPN dapat dihilangkan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi para nasabah agar terhindar dari pajak berganda dimana posisi ini secara tidak langsung akan kembali meningkatkan pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah (www.pajakonline.com, tanggal 27 Oktober 2008).
5. (Annual Meeting DPS, 14 Agustus 2007) Kebijakan dan inisiatif strategis untuk pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah secara sistematis telah dijabarkan dalam 'Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia' dan Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset secara signifikan (lompatan besar) dalam jangka pendek. Sasaran kebijakan dan program akselerasi 2007-2008 itu adalah:
 - a) Mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang
 - b) Memperkuat permodalan, manajemen dan SDM bank syariah
 - c) Mengoptimalkan peranan pemerintah (otoritas fiskal) dan BI (otoritas perbankan & moneter) sebagai penggerak pertumbuhan
 - d) Melibatkan seluruh *stakeholder* perbankan syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut diatas pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan program akselerasi perbankan syariah dengan menargetkan penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah sebesar

Rp.68,95 Triliun di tahun 2008 namun pembiayaan yang mampu disalurkan realisasinya hanya mencapai Rp. 38,195 Triliun

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam tesis ini adalah belum mampunya perbankan syariah mencapai target penyaluran pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ditahun 2008. Sehingga perlu penelitian faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia agar bisa dipakai oleh pihak yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna mendorong perbankan syariah khususnya dalam penyaluran pembiayaan agar lebih optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam tesis ini disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini pengambilan data di lakukan hanya untuk kurun waktu Maret 2004 - April 2009.

Variabel yang diteliti pun hanya dibatasi pada variabel: indikator kebijakan perbankan syariah secara nasional, indikator kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, yang diduga memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia di luar BPRS.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemilihan variabel-variabel penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, teorinya serta data-data yang berhasil di peroleh serta tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam tesis ini maka variabel-variabel independen yang akan digunakan untuk meneliti yang mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan yang diberikan adalah :

1. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sesuai dengan penelitian Nurhayati(2004) SWBI masih berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyaluran dana, kemudian penelitian Lathif (2008) menyatakan tidak berpengaruh terhadap FDR, sedangkan penelitian yang dilakukan Novianto(2008) menyatakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penyaluran dana. Perbedaan hasil penelitian tersebut memerlukan penelitian lagi dengan data yang periodenya lebih lama dan terkini.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan alat kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, sementara perbankan syariah memiliki kelebihan atas likuiditas dana yang tersedia untuk disalurkan pada nasabah yang membutuhkan, dalam hal ini adalah pihak defisit unit. Atas sejumlah dana yang ditanamkan bank syariah pada SWBI akan mendapatkan bonus yang merupakan keuntungan bagi bank syariah. Dengan demikian semakin besar bonus yang dihasilkan dari SWBI, maka akan semakin menarik bagi perbankan syariah untuk menyimpan dananya di SWBI sehingga akan menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah.

2. Non Performing Financing (NPF) sesuai penelitian Nurhayati (2004). Lathif(2008). menyatakan bahwa NPF berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran dana maupun *Financing To Deposit Ratio (FDR)*.

NPF merupakan kredit yang masuk kedalam kategori kredit kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan kata lain, tingginya NPL/NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Resiko pembiayaan (*financial risk*) terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan/pinjaman yang ditarik oleh pihak bank.

Pembiayaan yang termasuk NPF akan menyebabkan perbankan syariah harus mencadangkan keuntungan yang diperolehnya untuk penyisihan guna mengantisipasi resiko kerugian yang timbul. Akibatnya semakin tinggi NPF perbankan syariah akan menyebabkan perbankan syariah dalam kebijakan kreditnya akan semakin ketat persyaratannya sehingga mengakibatkan pembiayaan yang diberikan akan semakin turun.

3. Inflasi dengan alasan karena dari hasil penelitian Sujati (2007) menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap kredit. Demikian juga dari hasil penelitian Seyed (1994) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi (*rate of inflation*) mempunyai hubungan negatif terhadap pinjaman.

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. (Khalwaty, 2000:5).

Tingkat laju inflasi sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian, khususnya kegiatan perbankan. Kondisi laju inflasi yang tinggi menyebabkan pemerintah (Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan bank-bank di Indonesia. Ini dalam rangka agar inflasi dapat terkendali. Namun akibat lainnya adalah bank-bank umum konvensional terpaksa menaikkan suku bunga pinjamannya (kredit) yang juga berpengaruh

kepada perbankan Syariah yang juga menaikkan tingkat margin dan rate bagi hasil pembiayaan dan juga akan menaikkan tingkat bagi hasil DPK. Apabila suku bunga kredit naik maka sudah otomatis minat masyarakat untuk meminjam kredit semakin menurun, berarti jumlah alokasi kreditpun menurun

4. Equivalent Rate Pembiayaan sesuai dengan penelitian Sujati (2007) menyatakan bahwa Tingkat suku bunga riil pinjaman berpengaruh terhadap alokasi kredit bagi perbankan. Kemudian sesuai dengan penelitian Seyed (1994) yang menyatakan bahwa dalam teori bank pinjaman mempunyai hubungan positif terhadap tingkat pengembalian (*rate of return*) salah satunya. Demikian juga penelitian oleh Asy'ari (2004) yang menyatakan bahwa suku bunga pinjaman mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah

Equivalent Rate pinjaman ini dikenakan pada masyarakat yang ingin meminjam dana pada bank. Semakin tinggi bank mengenakan *equivalent rate* pinjaman, minat masyarakat untuk meminjam kredit semakin berkurang, sebab mereka dihadapkan dengan jumlah pembayaran kredit ditambah bunga yang tinggi. Dan ini memberatkan masyarakat yang bersangkutan dalam meminjam kredit, dan melunasi kreditnya dimasa yang akan datang. Namun sebaliknya, apabila bank mengenakan tingkat margin/bagihasil kredit (pinjaman) yang rendah maka minat masyarakat dalam meminjam kredit bertambah besar.

5. Equivalent Rate DPK didasarkan pada paper Khan (1994) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah dipengaruhi oleh Nisbah bagi hasil, tingkat indikasi imbalan IMA (nisbah bagi hasil untuk bank penanam modal).

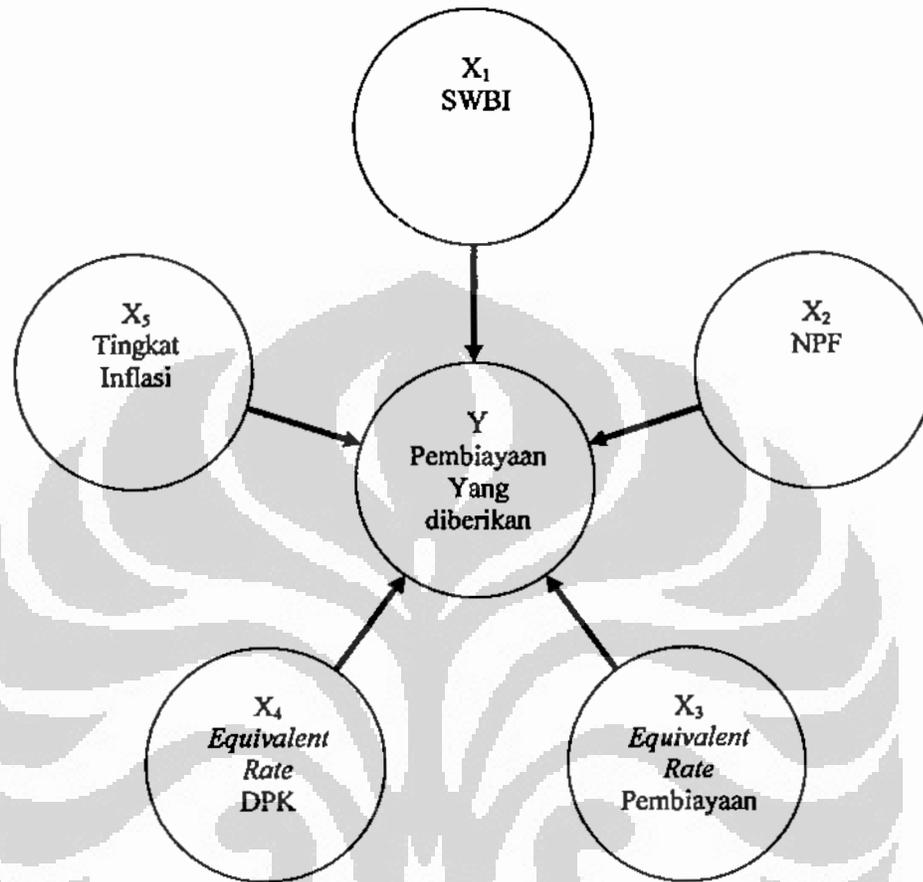
Bagi masyarakat yang menanamkan dananya pada bank, baik itu simpanan tabungan, deposito dan giro akan memperoleh suku bunga simpanan bagi bank konvensional dan tingkat bagi hasil bagi nasabah bank syariah. Suku bunga dan tingkat bagi hasil ini merupakan rangsangan bagi masyarakat agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Semakin tinggi suku bunga atau tingkat bagi hasil simpanan, maka masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh keuntungan dan hal itu akan berpengaruh pada penyaluran

pembiayaan karena dana yang diperoleh harus di salurkan ke masyarakat yang defisit agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah suku bunga simpanan atau tingkat bagi hasil, maka minat masyarakat dalam menabung akan berkurang, sebab masyarakat berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh dimasa yang akan datang dari bunga atau bagi hasil adalah kecil atau bagi bank syariah hal itu terkait kinerja mereka dan pembiayaan juga akan turun karena dana yang tersedia terbatas.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka disusunlah kerangka pemikiran dalam sebuah skema relasi antar variabel. Kerangka pemikiran (*theoretical framework*) dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mempertegas adanya hubungan beberapa faktor yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian (Sekaran, hal 91, 2000). Kerangka pemikiran ini selanjutnya berguna untuk merumuskan postulat serta hipotesis penelitian. Berdasarkan penelusuran literatur dari penelitian-penelitian terkait sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia jika dilihat dari sektor perbankan dan kebijakan moneter adalah SWBI, NPF, Tingkat Bagi Hasil dan Margin pembiayaan/*equivalent rate* pembiayaan yang diberikan. *Equivalent rate* DPK dan Tingkat Inflasi yang mana diagramnya dapat digambarkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5
Diagram Alur Pemikiran Hubungan Antar Variabel Penelitian :



Pada Gambar 1.5 diatas menunjukkan alur pikir dimana terjadi hubungan kelima variabel, yaitu variabel independen SWBI, Tingkat NPF, *Equivalent rate* Pembiayaan, *Equivalent rate* DPK dan Tingkat Inflasi. Dalam gambar tersebut diduga bahwa X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah mempengaruhi Pembiayaan yang diberikan (Y) yang menjadi variabel dependennya.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat disebutkan dalam penelitian ini terkait dengan pertanyaan penelitian yaitu :

HO: Faktor SBWI, NPF, Inflasi, *equivalent rate* pembiayaan, *equivalent rate* DPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

HI : Faktor SBWI, NPF, Inflasi, *equivalent rate* pembiayaan, *equivalent rate* DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresional. Penelitian regresional dimaksudkan untuk menghubungkan serta mengukur pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian bersifat kuantitatif dan berusaha membandingkan hubungan serta mengukur pengaruh antar variabel. Variabel yang diangkat dalam penelitian kali ini meliputi variabel bebas : SWBI (X_1), NPF (X_2), *Equivalent rate* Pembiayaan (X_3), *Equivalent rate* DPK (X_4), Inflasi (X_5) dan variabel terikat pembiayaan yang diberikan (Y).

1.7.2 Instrumen Penelitian

Persiapan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a) Memilih masalah dan melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, merumuskan hipotesis, menyusun dan menentukan instrumen

b) Pelaksanaan pengumpulan data

Peneliti berusaha mencari data di lapangan melalui teknik pengumpulan data yang telah ditentukan untuk kemudian dianalisis agar dapat menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Analisis data dan menarik kesimpulan

Dari data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

d) Menyusun laporan

Adalah tahap akhir prosedur penelitian yang mencakup penulisan laporan penelitian.

1.7.3 Jenis data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen yang ada. berupa data Pembiayaan yang diberikan secara nasional selama periode Maret 2004 s/d April 2009, serta data-data yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan yang diberikan yaitu data SWBI, NPF, *Equivalent Rate* Pembiayaan, *Equivalent Rate* DPK dan Inflasi yang diperoleh dari situs Bank Indonesia ([www. bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah

2. Observasi

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, pendengaran, peciuman dan sebagainya. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kegiatan bank syariah serta pelayanannya terhadap nasabah

1.7.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada sekumpulan data-data keuangan perbankan Syariah secara nasional dari bulan Maret 2004 s/d April 2009 dengan menggunakan pengolahan data secara statistik yaitu *Multiple Linier Regression*.

Penelitian akan difokuskan pada penyaluran pembiayaan pada perbankan Syariah diluar BPRS pada periode bulan Maret 2004 s/d April 2009 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model *Multiple Linier Regression* secara umum yaitu :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

Dimana,

Y_i	= variabel dependen
X_1, X_2, \dots, X_k	= variabel independen
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_k$	= Koefisien Regresi
k	= Banyaknya parameter.
i	= 1,2,3,.....,N (banyaknya observasi)
u_i	= variabel gangguan/error

1.8 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran pembahasan mengenai penelitian ini, maka penulisannya dalam lima bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan berbagai landasan teori yang digunakan dalam mengelola data dan yang digunakan dalam proses pembahasan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan penelitian dan menjabarkan analisisnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sekaligus saran-saran yang bermanfaat.



BAB II

STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Teori Bank Secara Umum

2.1.1 Arti dan Fungsi Perbankan

Perekonomian yang semakin modern memerlukan lembaga keuangan yang juga maju dan modern untuk menopang aktivitas ekonomi yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depository, yang lebih dikenal dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non depository. Kegiatan utama kedua lembaga keuangan ini adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat

Dalam UU No. 7, Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10, Tahun 1998 disebutkan bahwa :

1. *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*
2. *Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*
3. *Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*

Dari defenisi bank diatas memberi tekanan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

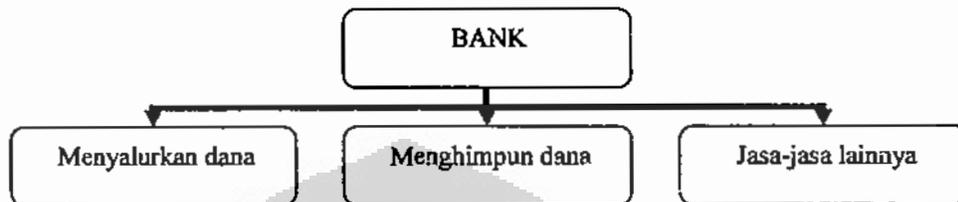
1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang merupakan

sumber dana bank. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan.

2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Dalam penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Defenisi tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia.
3. Selanjutnya, defenisi bank umum pada angka (2) diatas pada dasarnya merupakan penekanan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan defenisi ini dapat disimpulkan bahwa hanya bank umumlah yang dapat menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan tersebut. Ini pulalah yang menjadikan perbedaan prinsipil antar bank umum dengan BPR.

Untuk lebih jelasnya secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Diagram Kegiatan bank



Sumber : Kasmir (2004)

2.1.2 Penghimpunan Dana Bank

Sebagaimana kita ketahui bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan tabungan, deposito, dan giro (Kasmir, 2004,23).

Penghimpunan Dana Masyarakat Dana masyarakat, yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif paling mudah dan paling dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat (Kasmir, 2002:63). Pembagian simpanan pihak ketiga ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya sesuatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan, dan keamanan (Kasmir, 2004:64).

Pada pasal 1 butir 5 UU No. 10/1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana utama yang dihimpun oleh sektor perbankan adalah sebagai berikut :

1. Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana tabungan biasanya dimiliki oleh masyarakat dengan kegiatan bisnis relatif kecil, bahkan tidak ada.

2. Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus ditanggung bank.

Dana dari simpanan berjangka pada umumnya dihimpun dari pengusaha menengah dan masyarakat dari golongan menengah atas yang bukan bisnis.

3. Giro (*demand deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Dana giro umumnya digunakan oleh pengusaha dengan likuiditas tinggi sehingga pergerakan dananya amat cepat. Memiliki rekening giro untuk pengusaha merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran bisnis dan urusan pembayaran.

4. Sertifikat deposito (*certificate of deposit*) adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Berkaitan dengan fungsi bank untuk menyalurkan dana pada masyarakat untuk meminjamkan uang (kredit) pada masyarakat sangat terkait, dan tergantung dari seberapa besar jumlah dana yang dihimpun oleh bank. Bank yang mempunyai kapasitas jumlah penghimpunan dana yang besar, tentunya berasal dari jumlah simpanan yang mereka peroleh dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Dana masyarakat yang dihimpun bank berasal dari instrumen (rangsangan) yang dilakukan oleh bank pada masyarakat. Rangsangan tersebut bisa dalam bentuk suku bunga simpanan (tabungan) yang

menarik/tinggi untuk Bank Konvensional dan data historikal tingkat bagi hasil yang telah di berikan kepada nasabah dana yang rata-rata diatas tingkat suku bunga Bank Konvensional. Selain itu juga bisa dikarenakan fasilitas yang lengkap, kenyamanan pelayanan, reputasi (nama) yang baik/dipercaya, dan manajemennya yang baik. Hal-hal ini dapat membuat masyarakat semakin banyak menanamkan dananya pada bank tersebut. Semakin banyak masyarakat menanamkan dananya pada bank (menabung), baik dalam bentuk tabungan, deposito dan giro maka akan semakin banyak jumlah dana yang dihimpun oleh bank. Dengan semakin banyak jumlah dana yang dihimpun bank, sudah tentu bank akan semakin gencar dalam menyalurkan dananya (kredit) pada masyarakat baik itu kredit properti, ritel, menengah, besar.

Penghimpunan Dana Masyarakat, yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif paling mudah dan paling dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat (Kasmir, 2002:63). Pembagian simpanan pihak ketiga ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya sesuatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan, dan keamanan (Kasmir, 2004:64).

2.1.3 Suku Bunga Dana Pihak Ketiga

Setiap masyarakat yang melakukan interaksi dengan bank, baik itu interaksi dalam bentuk simpanan, maupun pinjaman (kredit), akan selalu terkait, dan dikenakan dengan yang namanya bunga (sumber : semua praktek perbankan konvensional dilapangan). Bagi masyarakat yang menanamkan dananya pada bank, baik itu simpanan tabungan, deposito dan giro akan dikenai suku bunga simpanan (dalam bentuk %). Suku bunga ini merupakan rangsangan dari bank konvensional agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Semakin tinggi suku bunga simpanan , maka masyarakat akan semakin giat untuk

menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh keuntungan. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah suku bunga simpanan, maka minat masyarakat dalam menabung akan berkurang, sebab masyarakat berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh dimasa yang akan datang dari bunga adalah kecil.

Namun pada perbankan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama beroperasi di Indonesia yang akan dibahas nanti di bab ini.

2.1.4 Penyaluran Kredit Perbankan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antarbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bagi bank, kredit adalah aset yang akan menghasilkan pendapatan sehingga porsinya sangat dominan. Dalam kondisi normal kredit bank merupakan 70%–80% dari total aset sebuah bank. Besarnya porsi kredit yang disalurkan perbankan dalam aktiva bank menunjukkan pentingnya peranan kredit dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga. Karena itu pengelolaan kredit menjadi prioritas utama dalam pengelolaan bank. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. Di Indonesia misalnya, bank-bank tidak diperkenankan melakukan jual beli saham di Bursa Efek. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 disebutkan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Defenisi kredit tersebut memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal berikut :

- a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank (kreditur).
- b. Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya.
- c. Jangka waktu pengembalian kredit.
- d. Pembayaran bunga.
- e. Perjanjian kredit.

Menurut Siamat (2001:165), kredit yang disalurkan oleh sistem perbankan dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu yaitu (1) kredit jangka pendek (*short term-loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk kredit modal kerja, (2) kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini ditujukan untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi, (3) kredit jangka panjang (*long term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi. Dilihat dari tujuan kredit maka kredit dapat dibedakan yaitu (1) kredit komersial (*comersial loan*) yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersial ini meliputi antara lain : kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya, (2) kredit konsumtif (*consumer loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank umum untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini oleh debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata

digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya misalnya membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya, (3) kredit produktif yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi dan sebagainya. Dilihat dari barang jaminan, kredit dapat dibedakan yaitu (1) kredit dengan jaminan (*secured loan*), (2) kredit dengan tanpa jaminan (*unsecure loan*). Kemudian penggolongan kredit dilihat dari penggunaannya yaitu (1) kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan dan sebagainya. Modal kerja untuk perdagangan misalnya kredit ekspor, kredit pertokoan dan sebagainya. Sedangkan kredit modal kerja industri misalnya kredit modal kerja pabrik tekstil dan sebagainya. Jadi prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi) lalu dijual (bisa dengan kredit atau tunai) selanjutnya memperoleh uang kas kembali (2) Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit Investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek.

2.1.5 Suku Bunga Kredit (Pinjaman)

Berbeda halnya dengan suku bunga pinjaman (kredit). Suku bunga ini dikenakan pada masyarakat yang ingin meminjam dana pada bank. Suku bunga kredit ini sangat tergantung dari jenis kredit yang diinginkan. Semakin tinggi bank mengenakan suku bunga kredit, minat masyarakat untuk meminjam kredit

semakin berkurang, sebab mereka dihadapkan dengan jumlah pembayaran kredit ditambah bunga yang tinggi. Dan ini memberatkan masyarakat yang bersangkutan dalam meminjam kredit, dan melunasi kreditnya dimasa yang akan datang. Namun sebaliknya, apabila bank mengenakan suku bunga kredit (pinjaman) yang rendah maka minat masyarakat dalam meminjam kredit bertambah besar. Dengan semakin rendahnya suku bunga kredit, maka akan memicu pertumbuhan, dan perkembangan jumlah usaha kecil, yang berarti dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sebab bagaimanapun juga usaha kecil selama ini dikenal sebagai penopang jumlah tenaga kerja di Indonesia yang semakin melimpah, dan agar tidak menganggur.

2.2 Inflasi

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman definisi (pengertian) tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat, dan luas antara inflasi, dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian, dan persepsi tentang inflasi. Demikian pula dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk solusinya. Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena, dan dilema ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. (Khalwaty, 2000:5).

Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai, dan dikendalikan karena:

1. Inflasi berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, sehingga perlu dicermati terutama oleh praktisi ekonomi, dan bisnis.
2. Inflasi yang tinggi mempunyai pengaruh agregatif terhadap perekonomian makro sebagai faktor eksternal dunia industri serta berdampak luas pula terhadap sektor perekonomian mikro yang merupakan faktor internal dunia bisnis.

3. Industri yang berorientasi ekspor akan semakin kurang kompetitif dipasaran global, dan bahkan dipasaran nasional jika terjadi inflasi yang tinggi. Biaya faktor-faktor produksi semakin mahal hingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hal ini semakin memberatkan negara-negara yang menganut sistem ekonomi terbuka.
4. Kemerosotan produksi baik yang berorientasi pada ekspor maupun untuk pasaran domestik akan meningkatkan laju pertumbuhan angka pengangguran yang sangat berbahaya bagi stabilitas perekonomian negara.
5. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional.
6. Inflasi yang tinggi akan semakin menumbuh-suburkan korupsi, manipulasi dan kolusi dikalangan elit pemerintahan dengan kalangan konglomerat yang membuat kepercayaan terhadap kewibawaan pemerintah semakin merosot.
7. Inflasi yang tinggi akan mendorong para pemodal nasional untuk menanamkan modalnya keluar negeri, dan bahkan para pengusaha akan merealokasikan industrinya ke luar negeri yang perekonomiannya lebih stabil. Jika hal ini terjadi, perekonomian nasional akan terus memanas, dan hancur. Industri semakin tidak kompetitif, dan tidak mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.

Tingkat laju inflasi sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian, khususnya kegiatan perbankan. Kondisi laju inflasi yang tinggi menyebabkan pemerintah (Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan bank-bank di Indonesia. Ini dalam rangka agar inflasi dapat terkendali. Namun akibat lainnya adalah bank-bank terpaksa menaikkan suku bunga pinjamannya (kredit). Ini dilakukan bank agar bank tidak mengalami *negative spread*. *Negative spread* adalah suatu kondisi dimana suku bunga simpanan lebih tinggi, dari suku bunga kredit (seperti yang dialami Indonesia saat krisis). Apabila ini terjadi maka bank-bank akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Disatu sisi bank wajib membayar bunga simpanan pada masyarakat yang tinggi, namun disisi lain penerimaan (margin

keuntungan) bank dari kredit juga menurun. Sebab pada saat itu suku bunga kredit sudah dinaikan sedemikian tingginya, dan sangat membebankan, dan merugikan masyarakat. Khususnya perekonomian Indonesia. Beranjak dari pengalaman tersebut, maka bank-bank tidak mau mengalami *negative spread*, sehingga pada saat suku bunga simpanan dinaikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah BI sebagai pengendali inflasi, maka bank-bank akan dengan sendirinya menaikkan suku bunga kreditnya (pinjaman). Apabila suku bunga kredit naik maka sudah otomatis minat masyarakat untuk meminjam kredit semakin menurun, berarti jumlah alokasi kreditpun menurun. Dalam praktek sehari-hari terkadang ada juga bank-bank yang tidak menaikkan suku bunga kreditnya. Mereka beranggapan jika menaikkan suku bunga kredit pada saat inflasi tinggi maka bank akan kesulitan dalam menyalurkan kredit pada masyarakat, dan banyak masyarakat yang tidak akan meminjam kredit. Dengan demikian tingkat keuntungan bank juga akan menurun. Jika tingkat keuntungan bank menurun, berarti bank juga akan mengalami kendala dalam membayar bunga simpanan pada masyarakat. Bank-bank yang bersikap seperti ini biasanya tidak banyak, dan tetap mempertahankan suku bunga kreditnya sambil menunggu sampai inflasi kembali stabil. Kondisi inflasi memang sangat dilematis dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian, khususnya praktek perbankan. Kondisi ini mensyaratkan adanya campur tangan dari pemerintah (khususnya BI) sebagai regulator perbankan agar inflasi tidak berlanjut-lanjut. Seandainya semua bank-bank menaikkan suku bunga kreditnya (tidak terkecuali) dikarenakan pengaruh inflasi tadi, sudah tentu ini sangat membahayakan perekonomian, banyak masyarakat pengusaha (baik kecil, dan besar) yang akan berguguran, yang pada akhirnya jumlah pengangguran juga akan meningkat. Untuk itu pemerintah (BI) perlu menjaga agar kondisi inflasi tetap stabil.

2.3 SWBI

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Jika dihubungkan dengan instrument perbankan, dimana fungsi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrumen pengendali moneter melalui pengawasan terhadap kinerja bank umum, maka bank syariah juga termasuk ke dalam kategori bank yang dapat melakukan transaksi dengan Bank Sentral dalam hal ini adalah SBI. Hanya saja dikarenakan bahwa perbankan syariah umumnya berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin berbagai unsur Maghrib (*Maysir, Gharar, Ribawi*) dimana SBI yang notabene menggunakan sistem bunga yang berdasarkan atas diskonto, maka muncullah apa yang dinamakan dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas (memenuhi kewajiban jangka pendek) didalam perbankan syariah (Wibowo, 2008)

Menurut Rully (2007) bagi bank syariah kelebihan dana likuiditas dapat disalurkan ke BI dengan membeli Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Bentuk *return* yang diperoleh dari SWBI ini berupa bonus yang tidak diperjanjikan dan kalau pun ada, jauh lebih rendah dibandingkan *return* SBI. Tentunya, hal ini menuntut bank syariah untuk memutar otak dalam menyalurkan dananya ke sektor riil karena SWBI tidak begitu menarik bagi bank syariah. Hal ini terbukti dengan peran intermediasi yang berjalan baik di bank-bank syariah dengan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak ada yang di bawah 90 persen. Bahkan untuk beberapa bank syariah melebihi angka 150 persen.

Hal ini tidak semata-mata dikarenakan bahwa bank-bank syariah sudah sepenuhnya memahami fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga dikarenakan SWBI tidak menjadi alternatif investasi bagi bank syariah, sebagaimana yang terjadi pada SBI di bank konvensional. Sehingga perbankan syariah dipacu untuk berpikir kreatif memilah dan memilih sektor riil yang layak untuk mendapatkan pembiayaan, dan sejatinya seperti itulah para bankir seharusnya berperan. Bank syariah dihadapkan pada alternatif untuk memperoleh *return* yang tinggi dari pembiayaan sektor riil atau dananya *idle* (bonus seadanya dari SWBI).

Pada tahun 2008 juga dilakukan penyempurnaan kerangka operasi moneter Syariah. Penyempurnaan tersebut diawali pada April 2008 dengan

introduksi SBI Syariah sebagai pengganti SWBI yang telah digunakan sejak tahun 2000. Pertimbangan bagi penggantian tersebut adalah peningkatan efektivitas kegiatan penyerapan likuiditas perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan operasi moneter Bank Indonesia. Disamping penyempurnaan *akad* yang digunakan, dari *wadiah* menjadi *ju'alah*, terdapat mekanisme operasi yang secara signifikan berubah dari *window* (mirip *standing facility*) menjadi lelang (*non-competitive bidding*). Secara formal, penggantian tersebut dilakukan dengan penerbitan PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Maret 2008.

Penerbitan instrumen investasi syariah yang kompetitif untuk menyerap akses likuiditas perbankan syariah. Instrumen ini bisa diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, maupun pihak swasta. Terbitnya SBI Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen investasi yang diperlukan untuk memacu perkembangan perbankan syariah. Instrumen Sertifikat Wadiah bank Indonesia (SWBI) dengan tingkat *return* yang relatif menyebabkan perbankan syariah tidak memiliki banyak pilihan instrumen investasi yang kompetitif ketika terjadi akses likuiditas, sehingga ekspansi penghimpunan dana menjadi tertahan.

Keberadaan SBI Syariah dengan tingkat *return* yang setara atau mendekati tingkat bunga SBI konvensional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik ketika masih diperlukannya waktu analisis sebelum penyaluran pembiayaan yang prudent dan berkualitas. Ketersediaan SBI Syariah, SBSN, dan instrumen investasi yang kompetitif lainnya akan membuat bank syariah bersemangat untuk menghimpun dana pihak ketiga yang pada gilirannya diharapkan mampu menggenjot perkembangan aset perbankan syariah.

2.4 Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)

Hal yang tidak menggembirakan bagi bank sebagai pemberi kredit apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Kredit bermasalah disebabkan

debitur dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit sekaligus dengan bunganya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kredit.

Non Performing Loan (NPL) atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit yang masuk ke dalam kategori kredit kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Status NPL/NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa pembayaran bunga/margin/bagihasil maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPL/NPF sekecil mungkin.

Dengan kata lain, tingginya NPL/NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Beberapa pengertian mengenai kolektivitas kredit yang dibuat menurut ketentuan Bank Indonesia (Martono, 2002: 61) adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit lancar, yaitu kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- 2) Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau bunganya terdapat tunggakan sampai 90 hari.
- 3) Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari waktu yang disepakati.
- 4) Kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari waktu yang disepakati.
- 5) Kredit macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

Faktor-faktor utama penyebab NPL/NPF dapat dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu: faktor internal bank, faktor kondisi debitur (termasuk calon debitur), dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal bank adalah hal-hal berkaitan dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) bank itu sendiri, kualitas proses bisnis bank, dan keterlibatan pihak lain dalam bisnis. Kondisi SDM menyangkut seberapa jauh integritas, kelalaian, kesengajaan, dan kemungkinan melakukan *moral hazard* dari komisaris, direksi, dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam menjalankan bisnisnya. Kualitas proses bisnis bank berkaitan dengan strategi pemasaran yang diterapkan, kualitas proses persetujuan kredit, syarat pemberian kredit, kualitas proses penagihan, proses pengawasan dan pengendalian. Sedangkan keterlibatan pihak lain dalam bisnis bank terutama terkait dengan penerapan *linkage* program dalam pengembangan usaha bank melalui kerjasama dengan pihak lain seperti bank umum.
- 2) Faktor kondisi debitur umumnya dikategorikan berdasarkan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Pada prakteknya kelima komponen C tersebut diterjemahkan ke dalam *credit rating* atau *credit scoring* sehingga bank dapat menilai risiko yang akan ditanggungnya pada saat menyalurkan kredit kepada nasabah-nasabahnya. Dengan demikian, bank dapat memutuskan pemberian kredit ke nasabah yang bersangkutan, mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, dan jatuh tempo, berdasarkan *rating* atau *scoring* tersebut.
- 3) Faktor eksternal pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam komponen *condition*. Termasuk ke dalam faktor eksternal ini adalah persaingan usaha dan kondisi usaha.

2.5. Bank Syariah

2.5.1 Defenisi Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu usaha

bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya (Sudarsono, 2003: 27).

UU No.10 Tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau dengan adanya pilihan memindahkan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.5.2 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio (2001, 29) dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam akad di bank syariah, dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad haik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut :
 - a. Rukun seperti penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab kabul.
 - b. Syarat seperti barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan .
2. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah

3. Dalam struktur organisasi di bank syariah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan pengawas syariah diletakkan setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank syariah.
4. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan
5. Lingkungan kerja pada bank syariah di arahkan agar memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap karyawan bank syariah seperti *amanah*(menjaga), *shiddiq* (dipercaya), *skillfull*(ahli), *fathanah*(Profesional), *team work* (kerjasama), *tabligh*(menyampaikan), dan adil.

Perbandingan antara bank syariah dan konvensional dapat kita simpulkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan antara bank syariah dan konvensional

NO	BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan falah oriented	Profit oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001)

2.5.3 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Capra (2000,2) tujuan dan fungsi dari sistem perbankan islam adalah:

- 1) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*).
- 2) Keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*).
- 3) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*).
- 4) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*).
- 5) Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari system perbankan (*effective other services*).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia (Capra, 2000, 3).

Tujuan dalam islam adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan islam. Hal tersebut merupakan suatu input penting sebagai bagian dari suatu output tertentu. Tujuan tersebut membawa kesucian dan dalam hal yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuan tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat tawar politik dan kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat penting bagi terwujudnya suatu tujuan yang merupakan suatu keunikan yang dapat disumbangkan oleh islam (Setyowati, 2008,35).

Sistem perbankan islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran atau penerimaan setiap yang ditentukan (*predetermined*) atas pinjaman atau kredit. Dengan demikian konsep bunga (*interest*) atas hutang secara tegas dilarang. Sistem perbankan islam lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan *sharing* risiko, mempromosikan kewirausahaani(*entrepreneurship*), melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat islam dalam membuka usaha adalah perusahaan perorangan (*sole proprietorship*), perusahaan patungan (*partnership*) (termasuk *mudharabah* dan *syirkah*) dan perusahaan perseroaan (*joint stock company*). Koperasi juga dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian islam selama tidak menjalankan transaksi-transaksi yang dilarang (Capra, 2000, 5).

2.5.4 Prinsip – Prinsip Bank Syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan "*menghasilkan uang dari uang*". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah juga sesuai Syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al- Qur'an dan Al Hadist. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Hal ini dimaksudkan dalam melakukan operasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktek-praktek bank yang mengandung dan dapat menimbulkan riba. Pelarangan mengenai riba ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah : 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya(Al Baqoroh:275)

2.5.5 Sistem lembaga dan operasional Bank Syariah

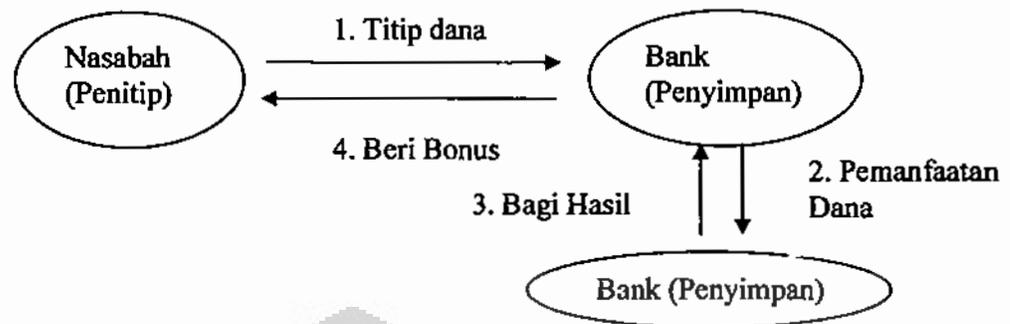
Kegiatan operasional bank Syariah baik dalam penghimpunan dana dan penanaman dana maupun pemberian jasa-jasa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan pembukaan kantor Bank Syariah, Bank Indonesia (1999) adalah sebagai berikut :

2.5.5.1 Penghimpunan Dana

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, sedangkan BPRS hanya dapat melayani tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*

Prinsip *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, dan dalam aplikasi perbankan dapat diterapkan pada produknya dalam menghimpun dana dari masyarakat yaitu : *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga halnya bank adalah penanggung seluruh kerugian). Sebagai imbalan, sipenyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Sekalipun demikian bank sebagai penerima titipan sekaligus juga memanfaatkan dana tersebut akan memberikan bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance* (didepan). Skema *wadi'ah* dapat dibuat seperti Gambar 2.2 berikut ini :

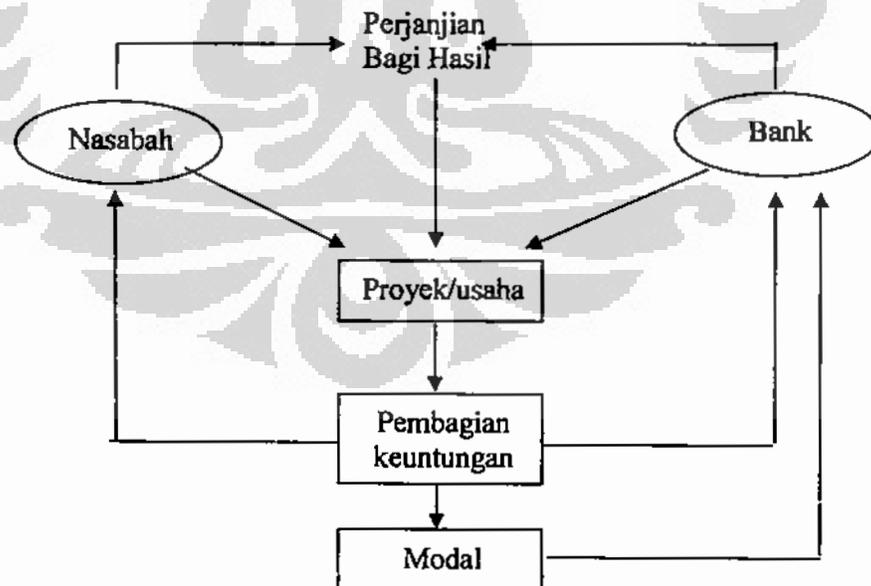
Gambar 2.2
Skema Wadi'ah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Sementara prinsip Mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Skema Mudharabah dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3
Skema Mudharabah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko (dari sudut kepentingan yang menyimpan dana dibank) karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada suatu akad dengan asumsi selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi
Besarnya bunga adalah suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh.
Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah/mudharib untung atau rugi	Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh mudharib
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil

Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Landasan syariah dari prinsip wadi'ah adalah sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisaa' :58 yaitu :

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

ع إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An-Nisaa':58)”

Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah :283 yaitu :

• وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah : 283)”

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Prinsip Wadi'ah dalam penghimpunan dana masyarakat dibank syariah dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan. Sedangkan pada prinsip mudharabah berdasarkan kewenangan yang diberikan pemilik dana terbagi dua macam yaitu pertama; *Mudharabah Mutlaqah* yaitu penghimpunan dana masyarakat dimana bank bebas menyalurkannya ke pihak ketiga pada masyarakat di bidang usaha yang dianggap layak bagi bank, dan kedua ; *Mudharabah Muqayyadah* yaitu penghimpunan dana khusus dari masyarakat dimana di penyimpanan dana menentukan ke sektor mana dana tersebut harus di salurkan.

2.5.3.2 Penyaluran Dana

Dalam sistem perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit berubah menjadi istilah pembiayaan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 12 UU No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jika kita bandingkan dengan istilah kredit dalam pasal 1 Angka 11 UU No.10 Tahun 1998 yaitu kredit yang diberikan oleh bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, maka dapat kita ketahui perbedaan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah, terletak pada awal persetujuan. Pada bank konvensional disebutkan tentang pemberian bunga, sedangkan pada bank syariah disebutkan dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam hal ini perumusan kredit pada UU No. 10 Tahun 1998 mirip dengan UU No.14 Tahun 1967, dengan kata lain rumusan tersebut telah kembali

kepada rumusan yang lama, yang justru telah dihapus oleh UU No. 7 Tahun 1992.

Dalam hukum islam, pembiayaan merupakan bagian dari pinjam meminjam. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bertimbal balik (dua pihak) di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang diterimanya.

Pembiayaan pada perbankan dengan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang lebih khusus jika kita bandingkan dengan prinsip konvensional. Jika mempergunakan sistem perbankan secara konvensional, maka penilaian pembiayaan (kredit pada bank konvensional) hanya semata-mata didasarkan pada mencari keuntungan, sedangkan pada penilaian pembiayaan dengan prinsip syariah bukan semata-mata hanya didasarkan pada usaha mencari keuntungan saja, namun juga mempertimbangkan aspek syariah. Tetapi sesungguhnya jika kita perhatikan secara mendalam, istilah bunga dan bagi hasil itu hanyalah berbeda dari sudut pandang dan dalam penerapannya saja, karena secara prinsipil bunga dengan bagi hasil itu adalah sama, ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan dari dana awal yang disediakan jika dalam pinjam meminjam (Setyowati, 2008, 47)

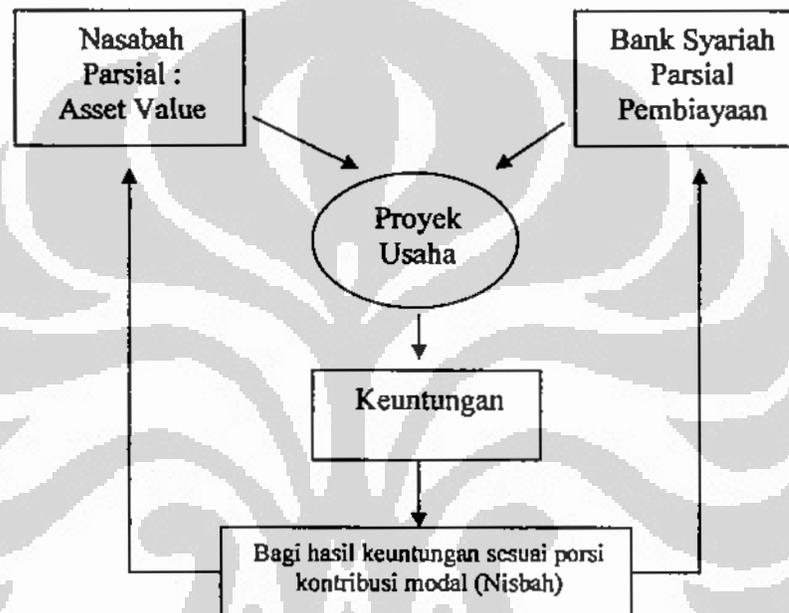
Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*mudharabah* dan *syirkah*) dan pembiayaan lainnya.

Pembiayaan dengan mudharabah telah dijelaskan diatas sedangkan pembiayaan dengan *musyarakah/syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

Skema musyarakah dapat dibuat seperti Gambar 2.4 berikut

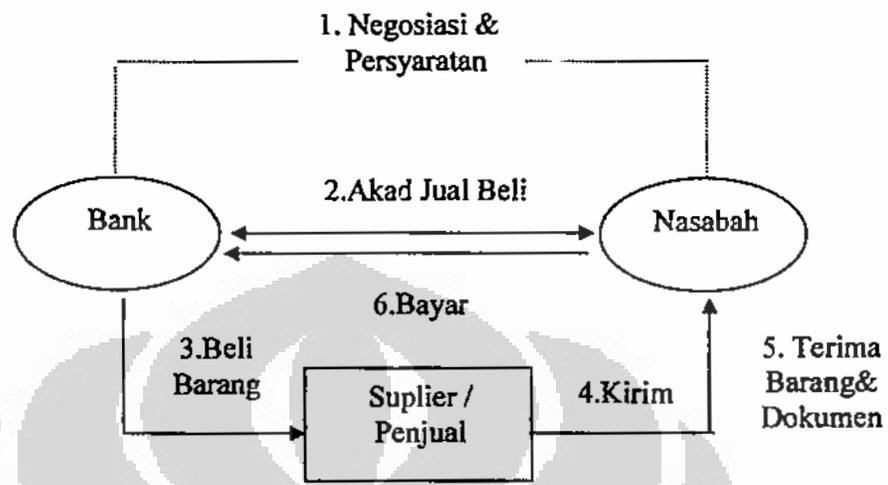
Gambar 2.4
Skema Musyarakah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Skemanya dapat dilihat dari gambar 2.5 berikut ini :

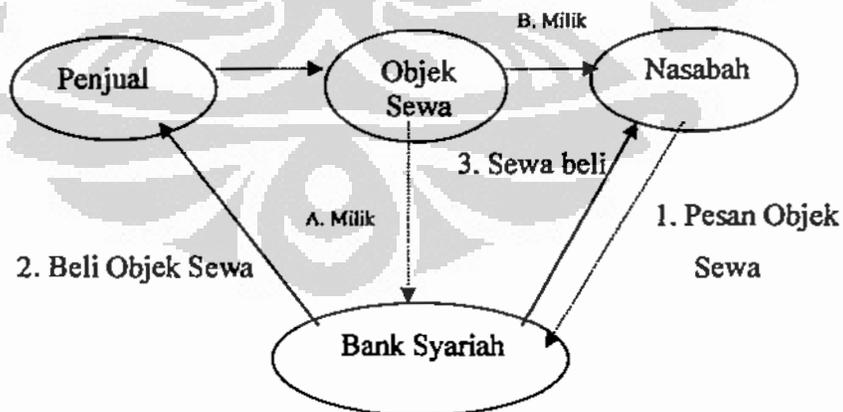
Gambar 2.5
Skema Murabahah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Pembiayaan lainnya *ijarah* (sewa) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Skemanya dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut :

Gambar 2.6
Skema Ijarah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Kegiatan operasional bank syariah lainnya yaitu jasa perbankan yaitu *Qard*, *Hiwalah* (Anjak Piutang), *Rahn* (Gadai). Bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan lainnya kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa *fee* atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *wakalah* (*agency*), *sharf* (jual beli valuta asing), *kafalah* (garansi Bank), *Ijarah* (Sewa), dan Wadi'ah Amanah (titipan) seperti *safe deposit box*.

Fungsi lainnya dari perbankan syariah adalah sebagai fungsi sosial. Dalam melakukan fungsi sosial tersebut bank syariah/unit usaha syariah juga bertindak sebagai lembaga *Baitul Maal* yang menerima dan menyalurkan dana kebajikan. Guna menjalankan kegiatan tersebut banyak syariah/unit usaha syariah wajib membentuk satuan kerja yang mengelola dana kebajikan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dalam bentuk *Qardhul Hasan*, santunan kebajikan, serta pengeluaran lainnya dan unit pengelola tersebut wajib membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan kepada Dewan Pengawas Syariah dan kepala Unit Usaha Syariah.

Berikut ini adalah Tabel Ringkasan Produksi Bank Syariah

a. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana dari masyarakat Bank Syariah memiliki produk-produk sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penghimpunan Dana Bank Syariah

No	Produk/jasa	Prinsip Syariah
1	Giro	Wadi'ah Yad Dhamanah
2	Tabungan	Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah
3	Deposito	Mudharabah Mutlaqah
4	Simpanan khusus	Mudharabah Mukayyadah

Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

b. Penyaluran Dana dan Jasa perbankan

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat dan jasa yang diberikan, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut seperti Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Penyaluran Dana Bank Syariah

No	Produk/jasa	Prinsip Syariah
1	Dana Talangan	Qardh
2	Penyertaan	Musyarakah
3	Sewa Beli	Ijarah Muntahiya Bittamlik(Ijarah Wa Iqtina)
4	Pembiayaan Modal Kerja	Mudharabah, Musyarakah, atau Murabahah
5	Pembiayaan Proyek	Mudharabah atau Musyarakah
6	Pembiayaan sektor Pertanian	Bai As Salam
7	Pembiayaan akuisisi aset	Ijarah Muntahiya Bittamlik
8	Pembiayaan ekspor	Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah
9	Anjak Piutang	Hiwalah
10	Letter of credit L/C	Wakalah
11	Garansi bank	Kafalah
12	Inkaso, Transfer	Wakalah dan Hawalah
13	Pinjaman sosial	Qardhul Hasan
14	Surat Berharga	Mudharabah, Qardh, Bai Al Dayn
15	Safe Deposit Box	Wadi'ah Amanah
16	Jual Beli Valas	Sharf
17	Gadai	Rahn

Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001)

Sedangkan Bank Syariah berdasarkan sistem perbankan ada 2 yaitu :

a. Bank Umum Syariah

Sejak Undang-Undang 7/1992 Indonesia telah menganut dual banking system, yang singkatnya berarti memperkenalkan dua sistem perbankan (*dual banking system*). Di masa UU 7/1992 dua sistem perbankan itu adalah Bank Umum dan Bank Berdasarkan Bagi Hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam). Baru melalui perubahan dengan UU 10/1998 secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah: Konvensional dan Syariah.

Bank Umum (Konvensional) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI 6/24/PBI/2004); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu trilyun rupiah (Pasal 4 PBI 7/35/PBI/2005).

b *Islamic Window / Dual System Bank/ Unit Usaha Syariah*

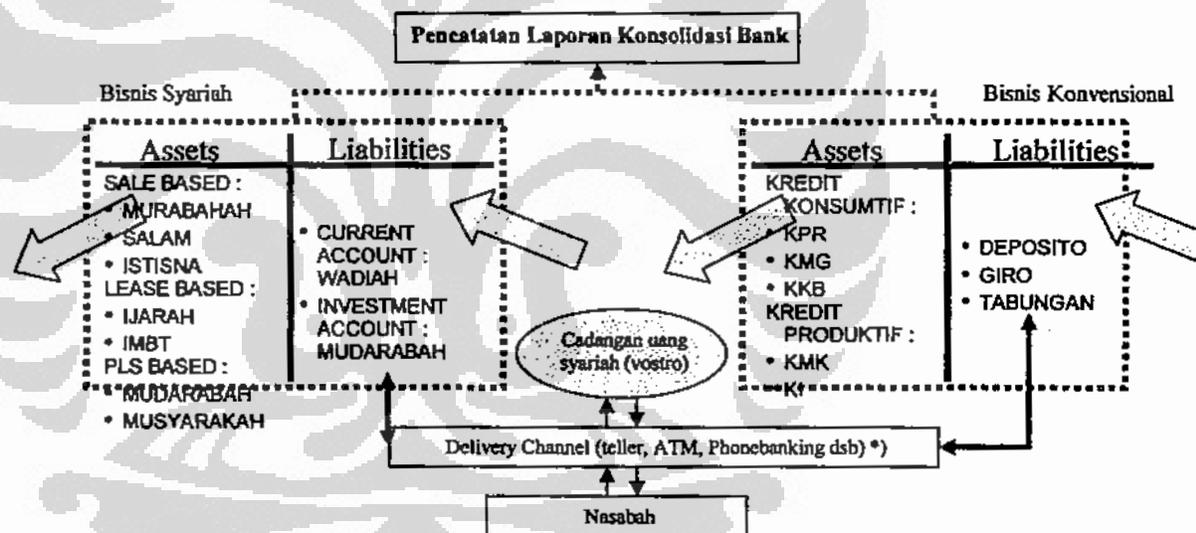
Perubahan Pasal 6 huruf m oleh UU 10/1998 terhadap UU 7/1992 menjadi peluang bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Ketentuan terbaru, yakni Pasal 13 (1) PBI 8/3/PBI/2006 menetapkan pembukaan tersebut bisa dilakukan dengan cara:

1. Membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
2. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
3. Meningkatkan status Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;

4. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
5. Meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah.
6. Membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada.

Pemisahan pengelolaan perbankan syariah dengan pola *dual system* bank dapat diperjelas dengan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang tidak tercampur.

Gambar 2.7



Sumber : BNI Syariah

*) Pertukaran fisik uang yang terjadi disini sama dengan transaksi yang terjadi di pasar, supermarket, sekolah dsb dimana terjadi pembayaran-pembayaran

2.6 Penelitian Sebelumnya tentang pelaksanaan Penyaluran pembiayaan perbankan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam tiga puluh tahun terakhir, telah banyak kajian yang membuktikan bahwa ada hubungan yang erat antara pengembangan lembaga keuangan perbankan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pertumbuhan ekonomi diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Sujati (2007). Ia meneliti tentang indentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank-Bank Umum di Indonesia pada bulan Februari 2004 sampai pada bulan desember 2005. Ia meneliti dengan menggunakan variabel suku bunga pinjaman riil, tingkat inflasi Indonesia, dan jumlah perhimpunan bank umum dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan model logaritma natural dengan metode OLS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga riil pinjaman, tingkat inflasi di Indonesia dan jumlah penghimpunan dana oleh bank-bank umum di Indonesia mempengaruhi secara serentak dan individu terhadap alokasi KUK pada bank-bank umum di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati(2004). Ia meneliti tentang indentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penyaluran dana perbankan Syariah di Indonesia. Ia meneliti dengan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dengan menggunakan metode analisis regresi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SWBI berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana ,DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana.

Penelitian yang dilakukan Asy'ari (2004). Ia meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut adalah suku bunga rata-rata pinjaman (SBRT), bonus SWBI (SWBI), DPK dan jumlah uang beredar dengan menggunakan analisis linier berganda . Hasil penelitiannya adalah hanya variabel DPK yang signifikan mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah sedangkan variabel lainnya tidak signifikan.

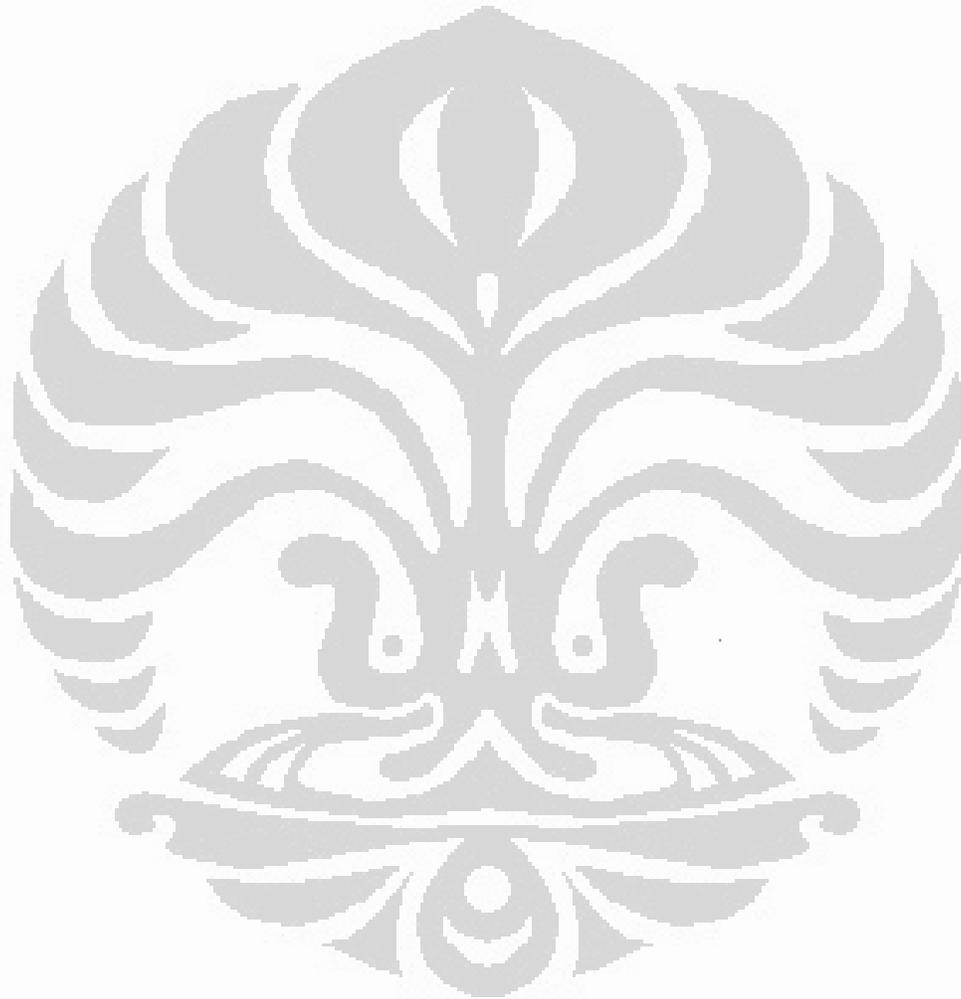
Penelitian yang dilakukan oleh Lathif (2008). Ia meneliti analisis Fungsi Intermediasi Bank Syariah di Indonesia periode 2004 sampai 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi intermediasi bank syariah di Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Januari 2004 sampai dengan Desember 2006. Variabel-variabel yang diteliti adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Non Performing Financing* periode sebelumnya (NPF2), *Return on Asset* (ROA), *Return on Asset* periode sebelumnya (ROA2), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Suku Bunga Kredit Investasi Bank Konvensional (INV), Tingkat Inflasi (INFL), Tingkat Inflasi periode sebelumnya (INFL2), serta Indeks Produksi Industri (IPI). Metode analisis yang digunakan adalah metode *ordinary least square* (OLS).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel bebas *Non Performing Financing* (NPF), Suku Bunga Kredit Investasi Bank Konvensional (INV), Tingkat Inflasi periode sebelumnya (INFL2), dan Indeks Produksi Industri (IPI) secara signifikan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah, sedangkan variabel bebas *Non Performing Financing* periode sebelumnya (NPF2), *Return on Asset* (ROA), *Return on Asset* periode sebelumnya (ROA2), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Tingkat Inflasi (INFL) tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah.

Novianto(2008) meneliti tentang Analisis Pengaruh DPK, SWBI, NPF dan Inflasi terhadap perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2005 - Desember 2007. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah. Sementara variabel bonus SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan namun pengaruh tersebut berhubungan negatif. Artinya, bila bonus SWBI turun maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Variabel NPF ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Demikian juga

variabel tingkat Inflasi dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada yang memiliki persamaan sebagian dalam mengambil variabel-variabel yang akan di teliti maupun dalam metode analisis yang digunakan namun berbeda dalam hal kurun waktu pengambilan data yaitu dari bulan Maret 2004 sampai April 2009.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana analisis *Multiple Linier Regresion* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil pengukuran yang didapat, akan dijadikan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhinya yang dilihat dari nilai *Pembiayaan yang diberikan* (PYD) perbankan syariah, sehingga diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak berwenang agar peranan perbankan syariah dalam pembangunan di Indonesia menjadi lebih optimal dan target yang diberikan dapat tercapai.

3.1 Data

Pengambilan data dilakukan di peroleh dari Pusat Informasi dan Data di Direktorat penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia atau di website Bank Indonesia yang di publikasikan. Data yang dibutuhkan yaitu:

1. Data pembiayaan yang diberikan (PYD) oleh perbankan syariah secara nasional periode Maret 2004 sampai dengan April 2009.
2. Data Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) secara nasional periode Maret 2004 sampai dengan April 2009.
3. Data *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah secara nasional periode Maret 2004 sampai dengan April 2009
4. Data *Equivalent Rate* Pembiayaan yang diberikan (ERPYPD) perbankan syariah secara nasional periode Maret 2004 sampai dengan April 2009.
5. Data *Equivalent Rate* Dana Pihak Ketiga (ERDPK) perbankan syariah secara nasional periode Maret 2004 sampai dengan April 2009.
6. Data Tingkat Inflasi secara nasional periode Maret 2004 sampai dengan April 2009.

Penelitian yang bersifat kuantitatif ini berusaha untuk membandingkan hubungan serta mengukur pengaruh antar variabel. Variabel yang diangkat dalam penelitian kali ini meliputi variable bebas : SWBI (X1), NPF (X2), *Equivalent Rate* Pembiayaan (X3), *Equivalent Rate* DPK (X5), dan Inflasi (X6) serta variabel terikat yaitu Pembiayaan yang diberikan (Y). Untuk memudahkan dalam proses analisis datanya pada penelitian ini analisis data menggunakan alat bantu program SPSS versi 13 for Windows Standar Edition.

3.2. Pengujian Data

3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas data penelitian dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi Normal atau tidak Normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.

Untuk menguji Normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik output SPSS dimana kita dapat menganalisis plot. Plot ini mempunyai aturan jika titik-titik (gradien antara Probabilita Kumulatif Observasi dan Probabilita Kumulatif Harapan) berada sepanjang garis, maka residual mengikuti distribusi normal. Keputusan yang diambil memang subjektif, tetapi dengan melihat penyimpangan titik-titik yang relatif tidak jauh dari garis, maka dapat disimpulkan bahwa residual telah mengikuti distribusi normal.

Pengujian lain secara grafik adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan pada metode grafik histogram :

1. Jika grafik histogram berbentuk simetris, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika grafik histogram tidak simetris (menceng ke kanan atau ke kiri), maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.2.2 Test Asumsi Klasik

3.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti, adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel bebas (*independent*) dari model regresi (Agus W, 2005,135). Uji multikolinearitas dengan demikian digunakan untuk menguji apakah pada model regresi dalam penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas sangat perlu karena, jika ada diketemukannya multikolinearitas akan mengakibatkan masalah, yaitu estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat dan menyebabkan variabel independen secara statistik melalui uji t kecil dan tidak signifikan terhadap variabel dependen. Atau jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen sama dengan nol.

Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Walaupun multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi.

Menurut Nachrowi dan Usman (2006, 105) ada beberapa cara mengatasi multikolinearitas salah satunya adalah melakukan pembedaan (*difference*). Teknik ini hanya berlaku untuk regresi yang dibentuk dari data *time series*. Caranya dimisalkan ada persamaan regresi majemuk :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + u_t \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_{t-1} = \beta_0 + \beta_1 X_{1t-1} + \beta_2 X_{2t-1} + u_{t-1} \dots\dots\dots(2)$$

Kurangkan persamaan (2) dari (1) didapat first difference

$$(Y_t - Y_{t-1}) = \beta_1 (X_{1t} - X_{1t-1}) + \beta_2 (X_{2t} - X_{2t-1}) + (u_t - u_{t-1}) \dots\dots\dots(3)$$

Kemudian model tersebut di defenisikan kembali sehingga menjadi model menjadi :

$$Y_t^* = \beta_2 X_{2t}^* + \beta_3 X_{3t}^* + u_t^* \dots\dots\dots(4)$$

dimana :

$$Y_t^* = (Y_t - Y_{t-1})$$

$$X_{2t}^* = (X_{2t} - X_{2t-1})$$

$$X_{3t}^* = (X_{3t} - X_{3t-1})$$

$$u_t^* = (u_t - u_{t-1})$$

3.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian dari residual model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak homoskedastis atau dengan kata lain tidak konstan. Data yang diambil dari pengamatan satu ke lain atau data yang diambil dari observasi satu ke yang lain tidak memiliki residual yang konstan atau tetap. Kemungkinan terjadinya heteroskedastis ini jikalau data diambil dengan teknik *cross section*. Konsekuensinya adalah metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum lagi sehingga kondisi BLUE tidak ditemukan hanya dapat ditemui kondisi LUE. Standar error metode OLS tidak dapat lagi dipercaya sehingga interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t dan F tidak lagi dapat dipercaya untuk evaluasi hasil regresi (Agus W, 2005, 147).

Teknik yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas diantaranya adalah :

- a. Melihat grafik antara residual pada waktu ke-t dengan residual pada waktu ke t-1

Dasar analisis :

1. Jika ada pola yang sistematis, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka menunjukkan $Var(u_t^2)$ tidak konstan untuk semua nilai X, atau variannya Heteroskedastis.

2. Jika tidak ada pola yang sistematis atau dapat dikatakan random, ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan $\text{Var}(u^2)$ pada suatu tingkat nilai X atau sekelompok X . Dengan kata lain, $\text{Var}(u^2)$ konstan untuk semua nilai X , atau variannya Homokedastis.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plots. Oleh sebab itu diperlukan uji statistic yang lebih dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heterokedastisitas.

b. Uji Glejser

Uji Glejser ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independent (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heterokedastisitas.

Atau keputusan heterokedastisitas sebagai berikut :

Jika $\text{sig} < 0.05$, maka model regresi mengalami heterokedastisitas

Jika $\text{sig} > 0.05$, maka model regresi tidak mengalami heterokedastisitas

(Ghozali, 2006, 109) mengemukakan cara memperbaiki model jika terdapat Heteroskedastisitas diantaranya adalah :

1. Melakukan transformasi dalam bentuk model regresi dengan membagi model regresi

Misalkan model awal $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + u_i$

Model transformasinya menjadi :

$$Y_i/X_{i1} = \beta_0/X_{i1} + \beta_1 + \beta_2 X_{i2}/X_{i1} + u_i/X_{i1}$$

Dalam bentuk ini β_1 menjadi intercept (Konstanta) dan β_0 menjadi koefisien. Jika ingin mengembalikan ke model asal, hendaklah dikalikan model transformasi yang sudah diestimasi ini dengan X_{i1} .

2. Melakukan transformasi logaritma sehingga model persamaan regresinya, menjadi :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ Log}X_1 + \beta_2 \text{ Log}X_2$$

3.2.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan yang lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lainnya. Data time series sering ditemukan adanya korelasi karena begitu dekatnya hubungan data yang dikumpulkan dan mempengaruhi, disebabkan data time series terkait dengan kebijakan atau kejadian yang saling berkaitan mempengaruhi data yang dikumpul ditahun-tahun yang beruntuntan tersebut.

Dengan adanya autokorelasi memiliki konsekuensi atas model regresi yaitu estimator dalam OLS masih linier dan tidak bias tetapi tidak memiliki varian yang minimum lagi. Estimator OLS tidak lagi bisa dikatakan BLUE tetapi LUE. LUE dalam model dikarenakan adanya autokorelasi maka akan menyebabkan perhitungan standar erornya tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya sehingga interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil daripada regresi model OLS (Agus W, 2005, 180).

Untuk menguji adanya autokorelasi dapat digunakan Uji Durbin – Watson (*DW test*) (Ghozali, 2006, 96). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara varfiabel independen.

Hipotesis yang akan diuji adalah :

H0 : Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H1 : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Tabel 3.1 Pengambilan keputusan untuk autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tidak tolak	$d_u < d < 4 - d_u$

(Nachrowi dan Usman, 2006, 199) mengemukakan cara mengatasi autokorelasi diantaranya adalah : estimasi ρ berdasarkan residual dimana formulanya adalah :

$$\rho = \frac{\sum u_t \cdot u_{t-1}}{\sum u_t^2}$$

Setelah nilai ρ didapat, maka kita tinggal melakukan transformasi terhadap data, dan selanjutnya membuat regresi, sebagaimana yang dilakukan pada transformasi yang menggunakan pendekatan Durbin-Watson.

Perhitungan ρ dapat juga dilakukan dengan membuat regresi antara residual pada waktu ke- t dengan residual pada waktu ke- $t-1$. Persamaannya adalah :

$$U_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

Kita dapat meregresikan u_t dan u_{t-1} , sehingga didapatkan koefisien korelasi yang diestimasi (ρ).

3.2.3 Pengujian Hipotesis

3.2.3.1 Analisis Varian (Uji F)

Analisis varian tersebut adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh kelima variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Yaitu variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Non Performing Financing*, *Equivalent rate* pembiayaan, *Equivalent rate* dana pihak ketiga, dan tingkat inflasi

sebagai independen variabel dan pembiayaan yang diberikan sebagai dependen variabel.

Tujuan dari analisis menggunakan uji F tersebut adalah apakah kelima variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependen variabel (Agus W, 2005, 88).

$$F = \frac{\text{ESS} / (k-1)}{\text{RSS} / (n-k)}$$

Dimana ;

F = Nilai hitung

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan (*Estimated Sum Of Square*)

RSS = Jumlah kuadrat residual (*Residual Sum Of Square*)

k = Banyaknya variabel

n = Banyaknya pengamatan

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan (df) sebesar (k-1) dan (n-k), maka perumusan hipotesisnya adalah :

1.) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2.) $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujiannya adalah ;

Jika F- hitung < F- tabel maka H_0 diterima

Jika F- hitung > F- tabel maka H_0 ditolak

Atau bisa juga dengan pengujian melalui :

Dengan melihat probabilitas value atau $p > \alpha$ maka H_0 diterima

Dengan melihat probabilitas value atau $p < \alpha$ maka H_0 ditolak

3.2.3.2 Uji t

Analisis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Hipotesa yang dibuat adalah :

$H_0 : \beta_1 \leq 0; i = 1, 2, 3 \dots k \rightarrow$ variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

$H_a : \beta_1 > 0; i = 1, 2, 3 \dots k \rightarrow$ variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara positif dan signifikan

Kriteria pengujiannya adalah ;

Dengan menggunakan tabel t-statistik, maka ;

Jika t-hitung $< t(\alpha, n-k) \rightarrow H_0$ diterima

Jika t-hitung $> t(\alpha, n-k) \rightarrow H_0$ ditolak

Atau bisa juga dengan pengujian melalui :

Dengan melihat probabilitas value atau $p > \alpha$ maka H_0 diterima

Dengan melihat probabilitas value atau $p < \alpha$ maka H_0 ditolak

t- hitung dirumuskan dengan (Agus W, 2005, 83).

dimana :

t = Nilai t-hitung

β_j = Koefisien regresi ke j

$S\beta_j$ = Standar deviasi koefisien regresi ke j

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$) untuk uji signifikansi dan derajat kebebasan sebesar (df) sebesar (n-k) maka ;

Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 \geq 0; i = 1, 2, 3 \dots k \rightarrow$ variabel independen tidak mempengaruhi

Pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah

$H_a : \beta_1 < 0; i = 1, 2, 3 \dots k \rightarrow$ variabel independen mempengaruhi secara negatif

dan signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah

Kriteria pengujiannya adalah ;

Dengan menggunakan tabel t-statistik, maka ;

Jika t-hitung $< t(\alpha, n-k) \rightarrow H_0$ diterima

Jika t-hitung $> t(\alpha, n-k) \rightarrow H_0$ ditolak

Atau bisa juga dengan pengujian melalui :

Dengan melihat probabilitas value atau $\rho > \alpha$ maka H_0 diterima

Dengan melihat probabilitas value atau $\rho < \alpha$ maka H_0 ditolak

3.2.4 Pemilihan Model

3.2.4.1 Koefisien Determinasi Majemuk (R^2)

Uji R square ini digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel tergantung (*dependent*) dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (*independent*). Nilai R square berada diantara 0-1, dimana semakin dekat nilai R square dengan 1 maka garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100 % variasi dalam Y, dan sebaliknya kalau nilai R square sama dengan 0 atau mendekatinya maka garis regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Besarnya R square dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (Agus W, 2005, 38).

$$R \text{ square} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Dimana :

$\sum e_i = \sum$ Kuadrat residual (*Residual Sum Of Square, RSS*)

$\sum y_i = \sum$ Kuadrat total (*Total Sum Of Square, TSS*)

Atau bisa dilihat pada hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen amat terbatas.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independent yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independent, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti banyak menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 ,

nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

3.3 Model Multiple Linier Regression

Untuk menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam hal pembiayaan yang diberikan dianalisis menggunakan metode kuadrat terkecil OLS dengan berbagai asumsi dasarnya, juga akan diperkuat perhitungannya dengan menggunakan bantuan dari program komputer yaitu program Eviews. Secara fungsional model matematikanya dapat ditulis $Y = F (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$. Selanjutnya dengan menggunakan model *Multiple Linier Regression* formulasinya dapat dibentuk lebih nyata sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + u_t$$

Keterangannya adalah sebagai berikut :

Y = Pembiayaan yang diberikan (Juta Rupiah)

X₁ = SWBI (Juta Rupiah)

X₂ = Equivalent Rate Pembiayaan (%)

X₃ = Equivalent Rate DPK (%)

X₄ = Non Performing Financing/NPF (%)

X₅ = Tingkat Inflasi (%)

β₀ = Konstanta

β₁ – β₅ = Koefisien Regresi

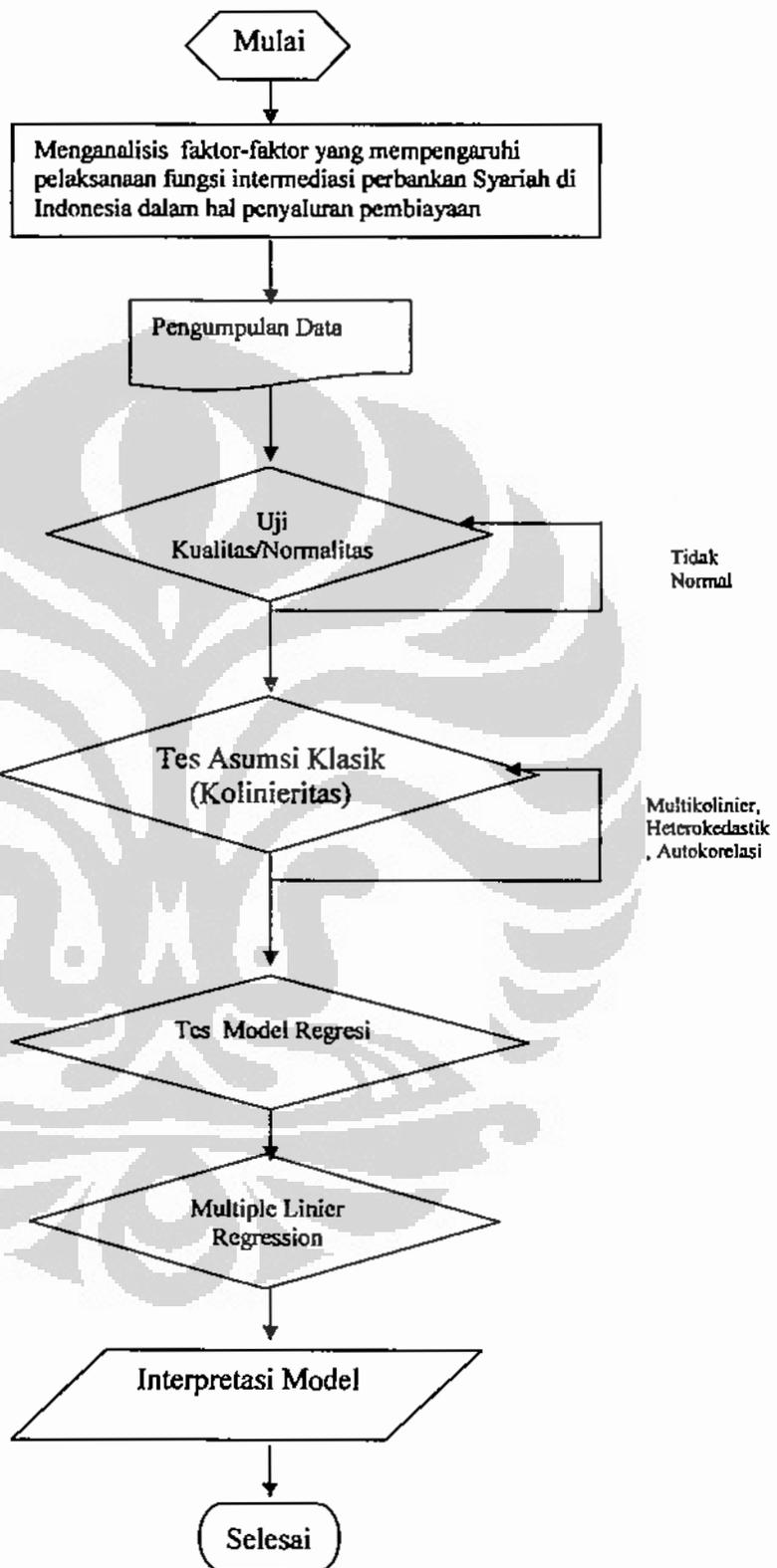
u_t = Variabel Gangguan/Error

3.3.1 Interpretasi model / parameter

Setelah mendapatkan hasil analisis data menggunakan program SPSS maka akan dilakukan interpretasi terhadap hasil regresi.

Hasil pengujian data ini akan dijadikan untuk menguji apakah hipotesa yang telah disusun itu benar atau menunjukkan hasil yang berbeda. Dari hasil yang diperoleh bisa dilihat signifikansi antara variabel bebas yang diukur dengan variabel terikatnya. Hasil pengujian ini akan dirujuk pada teori-teori sebelumnya, sehingga dapat diketahui faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.



Skema Penelitian

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang ditempuh dengan melakukan dengan analisis *Multiple Linier Regression*. Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dimana pengolahan datanya mempergunakan bantuan komputer *SPSS*.

Tahap-tahap pengujian data yaitu uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heterokedastitas, dan uji autokorelasi), uji Hipotesis (uji koefisien determinasi R^2 , Uji Simultan/uji keseluruhan variabel Independen, dan uji koefisien regresi/parsial. Jika data lolos dari hasil pengujian tersebut diatas. Selanjutnya, akan diperoleh model *Multiple Linier Regression* yang telah memiliki variabel-variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

4.1 Analisis Kinerja Variabel Penelitian secara grafik.

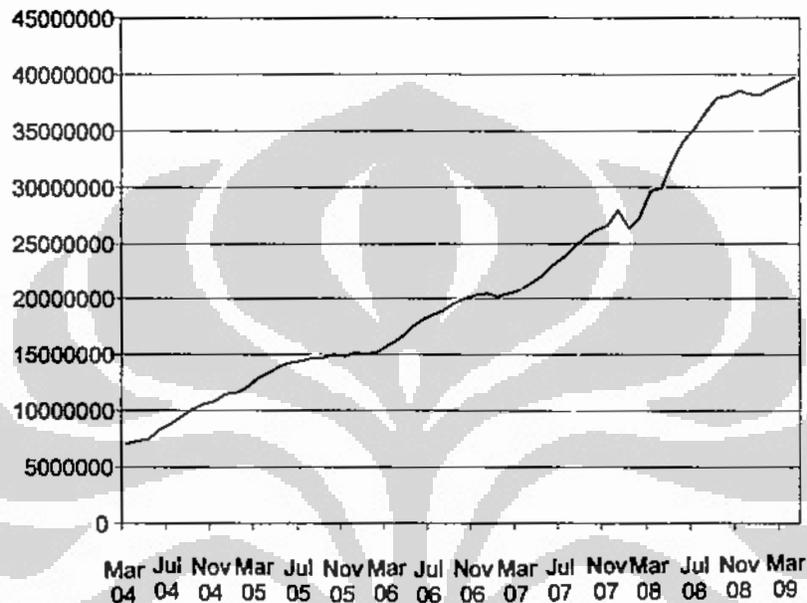
4.1.1 Perkembangan Kinerja Variabel Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan dalam hal ini merupakan variabel dependen penelitian dapat kita lakukan analisis dilihat dari data kenyataan yang ada yang bisa kita lihat secara grafik perkembangannya.

Perkembangan pembiayaan syariah setelah dikumpulkannya data oleh penulis adalah seperti Gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah
di Indonesia periode Maret 2004 – Maret 2009

Pembiayaan



Sumber : Bank Indonesia

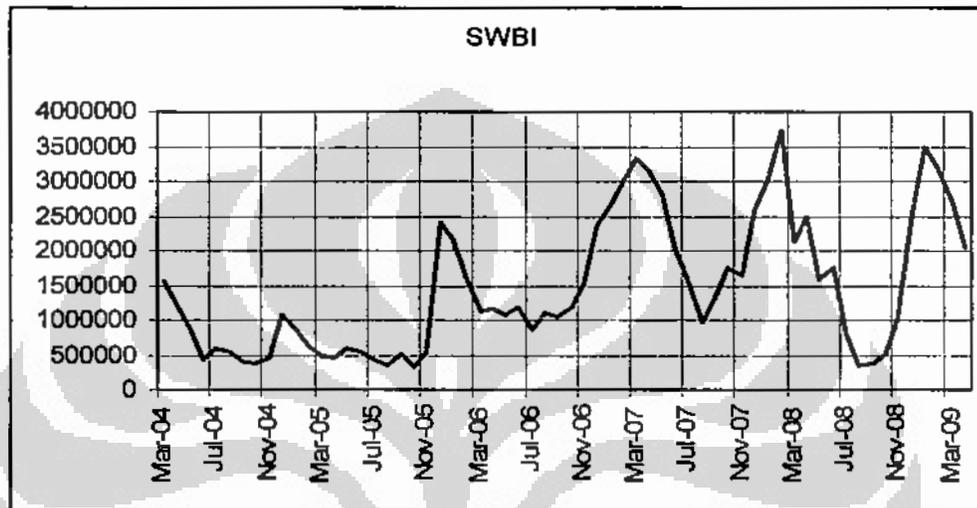
Dari Gambar 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari awal periode penelitian sampai akhir periode penelitian dimana terlihat peningkatan yang cukup cepat dari pembiayaan terlihat dimulai dari awal periode Maret 2004 sampai periode Maret 2009 dan dari bulan Oktober dan November 2008 terlihat peningkatan pembiayaan sudah mulai mengalami perlambatan meskipun terlihat masih semakin meningkat..

4.1.2 Perkembangan Kinerja Variabel SWBI

Variabel SWBI adalah merupakan salah satu variabel independen yang akan di teliti dalam mempengaruhi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah. Perkembangan

kinerja SWBI selama periode penelitian dapat dilihat secara grafik yaitu sesuai Gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2
Perkembangan Kinerja SWBI periode Maret 2004-Maret 2009



Sumber : Bank Indonesia

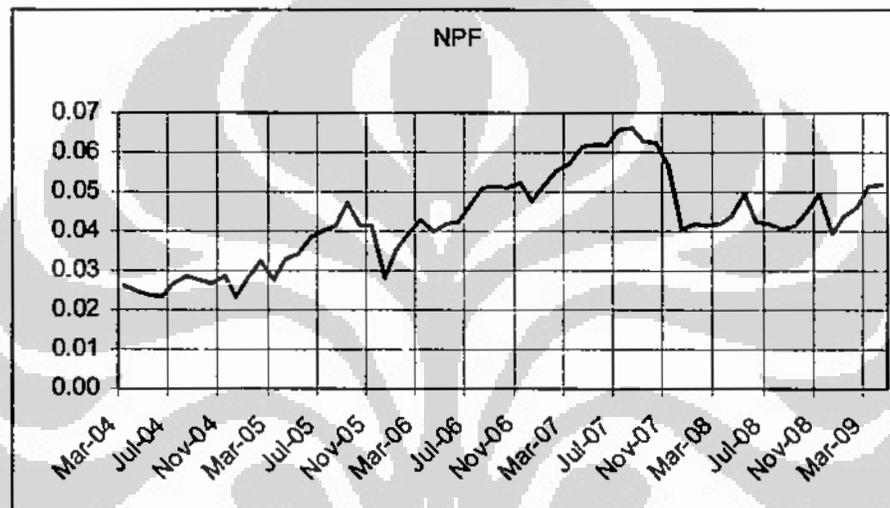
Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa perkembangan SWBI terlihat berfluktuasi cukup tinggi, hal ini bisa dimaklumi karena SWBI/SBIS merupakan salah satu instrumen jangka pendek bagi perbankan syariah sehingga saat dana yang disimpan di SWBI/SBIS mencapai titik puncak saat itu perbankan syariah menempatkan dananya sementara guna berharap bonus SWBI/SBIS dan saat dana sudah mulai ditarik dari SWBI untuk disalurkan ke pembiayaan maka terlihat digrafik gambarnya menurun drastis. Namun secara umum bisa kita lihat bahwa pergerakan SWBI/SBIS polanya cenderung mengalami peningkatan mengikuti pergerakan pembiayaan pada perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan jumlah dana yang disimpan oleh perbankan Syariah di SWBI/SBIS maka juga diikuti oleh kenaikan pembiayaan yang disalurkan perbankan ke masyarakat atau sektor riil.

4.1.3 Perkembangan variabel NPF

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) disini adalah juga merupakan variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan yang diberikan (PYD). Secara Grafik kita bisa melihat perkembangan NPF dalam periode penelitian seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3

Perkembangan NPF periode Maret 2004-Maret 2009



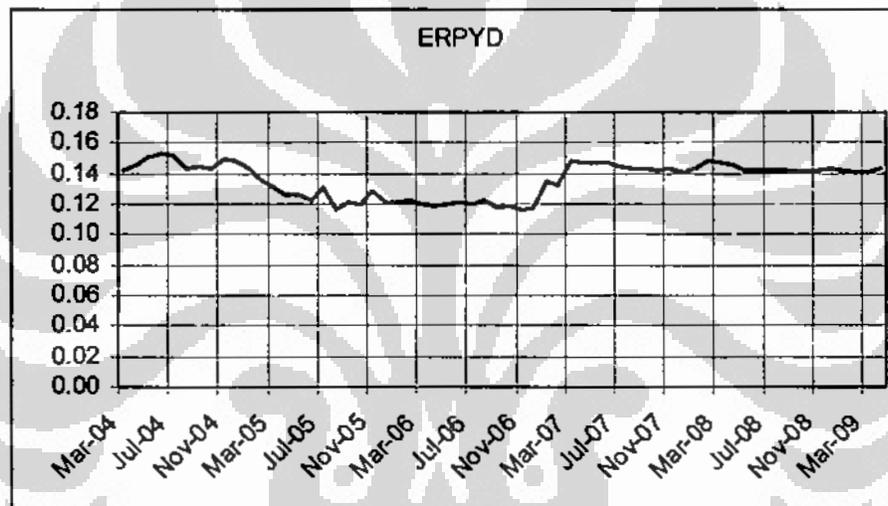
Sumber : Bank Indonesia

Dari Gambar 4.3 diatas terlihat pergerakan NPF terlihat meningkat sejak periode Maret 2004 sekitar 2,5 % sampai mencapai tingkat tertinggi di sekitar bulan Agustus 2007, namun kemudian kembali menurun di awal tahun 2008 dan sampai akhir periode penelitian NPF berkisar antara 4% - 5%. Penurunan NPF sejak bulan Agustus 2008 sesuai dengan laporan dari Bank Indonesia yang melaporkan bahwa penurunan NPF tersebut disebabkan oleh proses restrukturisasi, *write off* dan pengambil alihan pembiayaan oleh Bank lain (*take over*).

4.1.4 Perkembangan variabel *equivalent rate* pembiayaan (ERPYPD)

Equivalent rate pembiayaan (ERPYPD) adalah termasuk variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Perkembangannya secara grafik dapat kita lihat dari Gambar 4.4 berikut ini :

Gambar 4.4
Perkembangan *Equivalent Rate* pembiayaan Perbankan Syariah
periode Maret 2004 – Maret 2009



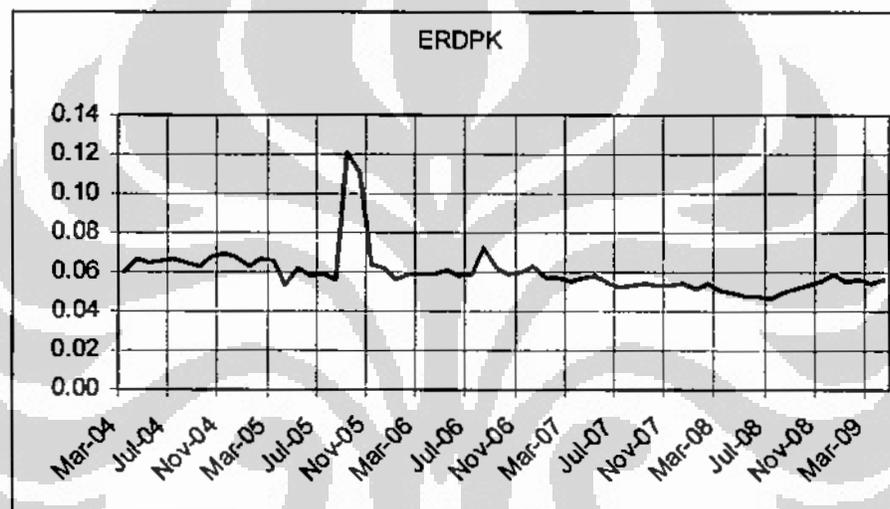
Sumber : Bank Indonesia

Dari Gambar 4.4 diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan *equivalent rate* pembiayaan perbankan syariah tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Tingkat margin/bagi hasil pembiayaan perbankan syariah *equivalent ratenya* antara 12%-15% pada periode penelitian. *Equivalent rate* yang rendah terlihat pada periode sekitar bulan Oktober 2005 sampai April 2007 yang berkisar rata-rata sebesar 12%, kemudian disekitar bulan Mei 2007 sampai akhir periode 2007 cukup stabil dengan rata-rata *equivalent rate* sekitar 14%.

4.1.5 Perkembangan Variabel *Equivalent Rate* Dana Pihak Ketiga (ERDPK)

Perkembangan *equivalent rate* dana pihak ketiga yang merupakan salah satu variabel independent yang mempengaruhi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dapat kita lihat pada Gambar 4.5 berikut ini :

Gambar 4.5
Perkembangan *equivalent rate* dana pihak ketiga (ERDPK) perbankan syariah periode maret 2004 – maret 2009



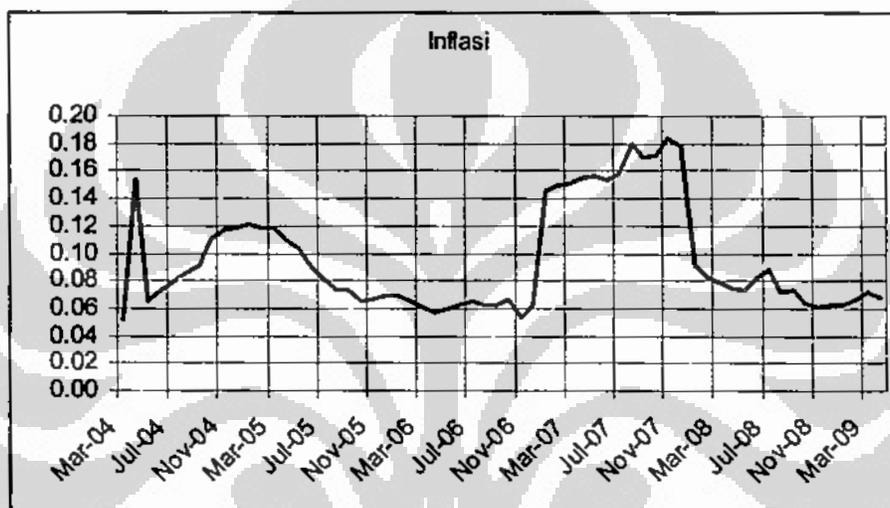
Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.5 diatas terlihat perkembangan *equivalent rate* dana pihak ketiga perbankan syariah relatif stabil rata-rata berkisar pada 6%. *Equivalent rate* DPK sempat naik cukup tinggi pada bulan September 2005 dan Oktober 2005 sempat menyentuh 12 % dan pada bulan Juli 2008 sempat menyentuh tingkat terendah yaitu tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Tingkat margin/bagi hasil pembiayaan perbankan syariah *equivalent ratenya* antara 12%-15% pada periode penelitian. *Equivalent rate* DPK yang rendah terlihat pada periode sekitar bulan Oktober 2005 sampai April 2007 yang berkisar rata-rata sebesar 12%, kemudian disckitar bulan Mei 2007 sampai akhir periode 2007 cukup stabil dengan rata-rata *equivalent rate* DPK sekitar 14%.

4.1.6 Perkembangan Variabel Inflasi

Variabel Inflasi yang juga merupakan variabel independen yang mempengaruhi pembiayaan (PYD) dapat kita lihat perkembangannya pada Gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6
Perkembangan Inflasi Periode maret 2004 – maret 2009



Sumber : Bank Indonesia

Dari Gambar 4.6 diatas terlihat bahwa tingkat inflasi selama periode penelitian terlihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi di akhir tahun 2007 yang berada di posisi 18% karena pengaruh krisis global. Sementara diakhir periode inflasi terlihat menurun ke posisi sekitar 6%.

4.2 Pengolahan dan Analisis data

Pengujian data untuk menguji variable-variabel independen yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) , Non Performing Financing (NPF), *Equivalent Rate* Pembiayaan yang diberikan (ERPYPD), *Equivalent Rate* Dana Pihak Ketiga (ERDPK) dan Inflasi yang mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan yang diberikan

(PYD) telah mengalami proses transformasi yang baru karena disebabkan oleh autokorelasi yang akan dibahas pada pengujian autokorelasi sehingga data yang dilakukan pengujian ini adalah data yang telah layak untuk dijadikan model untuk menganalisis penelitian.

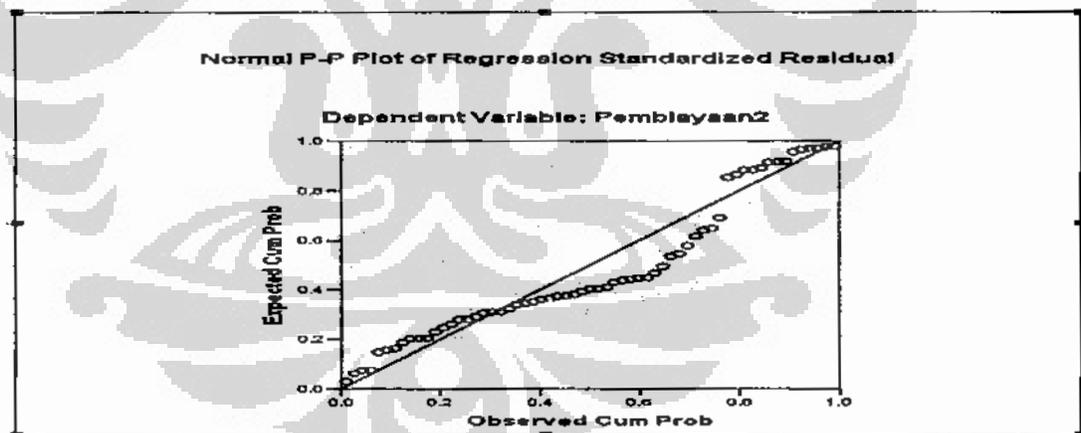
4.2.1 Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan juga dengan melihat grafik histogram untuk melihat apakah grafik berbentuk simetris (tidak menceng kekanan atau kekiri).

Gambar 4.7

Regression Standardized Residual

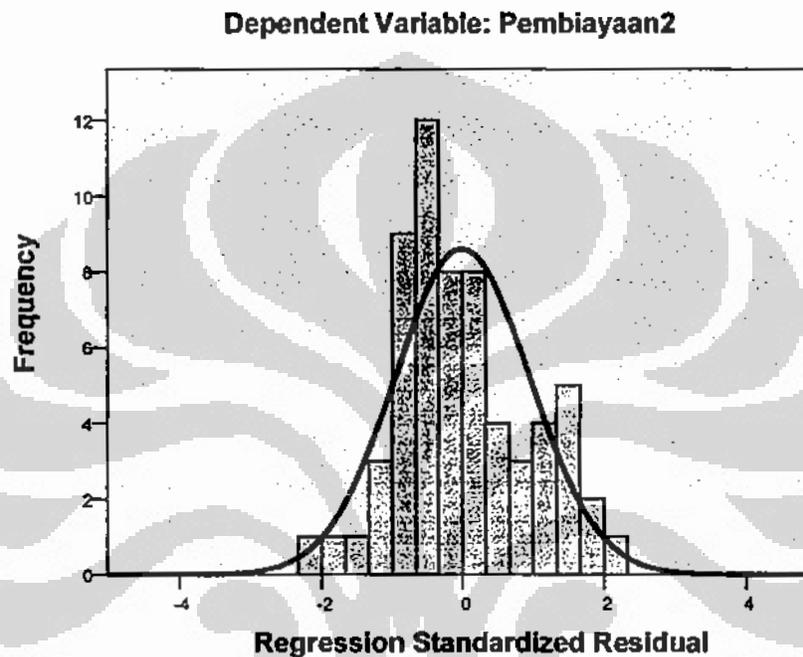
Charts



Sumber : Data diolah dengan SPSS

Gambar 4.8
Grafik Histogram

Histogram



Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dasar pengambilan keputusan pada metode normal *probability plot* :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan dasar pengambilan keputusan pada metode grafik histogram :

1. Jika grafik histogram berbentuk simetris, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika grafik histogram tidak simetris (menceng ke kanan atau ke kiri), maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal dan pada grafik histogram terlihat simetris. Hal ini berarti model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *variance inflation factor*.

Keputusan yang diambil yaitu :

Jika nilai *variance inflation factor* > 10 maka terjadi multikolinearitas

Jika nilai *variance inflation factor* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas

Dari hasil pengolahan data statistik diperoleh tabel pengujian multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	VIF	Kesimpulan
1.	NPF	1.054	Tidak ada multikolinearitas
2.	ERPYPD	1.205	Tidak ada multikolinearitas
3.	ERDPK	1.029	Tidak ada multikolinearitas
4.	SWBI	1.039	Tidak ada multikolinearitas
5.	Inflasi	1.154	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen (karakteristik perusahaan) mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regression yang digunakan terhindar dari masalah multikolinearitas. Hal ini berarti bahwa antara variabel independent tidak mempunyai hubungan langsung.

4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

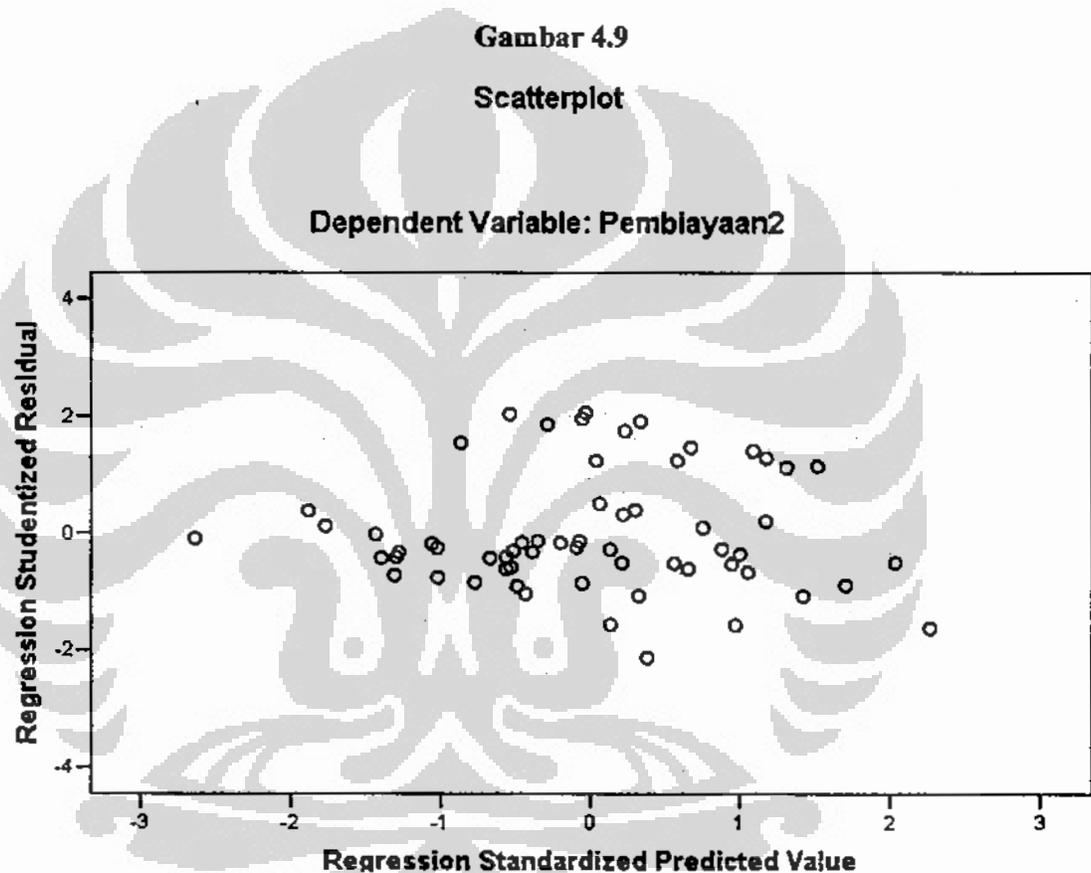
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas :

a. Uji Heterokedastisitas secara grafik *scatterplot*

Uji Heterokedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.

Dasar analisis dan keputusan yang diambil :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dari Gambar 4.9 diatas, terlihat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2001 : 71).

Namun karena analisis dengan grafik *plots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik *plots*. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heterokedastis diantaranya adalah dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2006, 108)

b. Uji Glejser

Dalam uji glejser dilakukan dengan meregres nilai *absolut residual* terhadap variabel independen (Gujarati, 2003)

Adapun keputusan heterokedastisitas sebagai berikut :

Jika $\text{sig} < 0.05$, maka model regresi mengalami heterokedastisitas

Jika $\text{sig} > 0.05$, maka model regresi tidak mengalami heterokedastisitas

Tabel 4.2
Pengujian Heterokedastisitas

No.	Variabel	Sig	Kesimpulan
1.	NPF2	.960	Tidak terjadi Heterokedastisitas
2.	ERP2D	.095	Tidak terjadi Heterokedastisitas
3.	ERDPK2	.330	Tidak terjadi Heterokedastisitas
4.	SWBI2	.759	Tidak terjadi Heterokedastisitas
5.	Inflasi2	.158	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dengan melihat hasil Tabel 4.2 mengenai pengujian heterokedastisitas dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pendeteksian autokorelasi digunakan nilai Durbin Watson (DW).

Pada proses pengolahan data awal dari pengujian Durbin Watson terjadi adanya autokorelasi seperti yang terlihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Model summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 ^a	.562	.522	6714150.51	.650

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Equivalent rate DPK, SWBI, Equivalent rate PYD, Non Performing Financing (Gross)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dari Tabel 4.3 diatas terlihat bahwa nilai Durbin Watsonnya adalah sebesar 0,650 maka berdasarkan data pada $\alpha = 5\%$, k (jumlah parameter)=5, $n=61$ dilihat dari tabel Durban Watson di peroleh $dl=1,408$ dan $du=1,767$, sehingga nilai $dw < dl$ artinya residual mempunyai korelasi positif. Sehingga harus diatasi permasalahan tersebut agar model yang didapatkan menjadi lebih tepat. Metode yang digunakan adalah dengan cara mengestimasi nilai ρ (koefisien autokorelasi) berdasarkan *residual* / nilai *error*nya. Langkah awalnya adalah mencari koefisien autokorelasi ρ dengan cara meregresikan residual periode t dengan residual periode $t-1$ tanpa konstanta atau secara formulasi dinyatakan dengan :

$$\text{Resid periode } t = \rho \text{ Resid periode } t-1$$

Dimana ρ = koefisien autokorelasi

Untuk mencari koefisien autokorelasinya dilakukan dengan menggunakan program SPSS sehingga outputnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Coefficients Lagres 2

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	LAGRES2	.581	.104	.584	5.568	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Linear Regression through the Origin

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dari tabel diatas dapat kita peroleh nilai koefisien autokorelasi (ρ) yaitu sebesar 0,581. Kemudian kita transformasikan semua variabel dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Pembiayaan}_2 = \text{Pembiayaan}_t - (0,581 \times \text{Pembiayaan}_{t-1})$$

$$\text{SWBI}_2 = \text{SWBI}_t - (0,581 \times \text{SWBI}_{t-1})$$

$$\text{NPF}_2 = \text{NPF}_t - (0,581 \times \text{NPF}_{t-1})$$

$$\text{ERPVD}_2 = \text{ERPVD}_t - (0,581 \times \text{ERPVD}_{t-1})$$

$$\text{ERDPK}_2 = \text{ERDPK}_t - (0,581 \times \text{ERDPK}_{t-1})$$

$$\text{Inflasi}_2 = \text{Inflasi}_t - (0,581 \times \text{Inflasi}_{t-1})$$

Kemudian dilakukan proses regresi terbaru lengkap dan pengujian sesuai urutan pengujian model *Multiple Linier Regression* sehingga model untuk variabel dependennya adalah : $\text{Pembiayaan}_2 = f(\text{SWBI}_2, \text{NPF}_2, \text{ERPVD}_2, \text{ERDPK}_2, \text{Inflasi}_2)$. Setelah itu barulah kita lakukan pengujian autokolerasi dari pengolahan variabel yang baru yaitu sesuai dengan table-tabel berikut :

Tabel 4.5
Keputusan Autokorelasi

Kriteria	Ho	Keputusan
$0 < DW < d_l$	Ditolak	Ada autokorelasi positif
$d_l < DW < d_u$	Tidak ada keputusan	Tidak ada keputusan
$4 - d_l < DW < 4$	Ditolak	Ada autokorelasi negative
$4 - d_u < DW < 4 - d_l$	Tidak ada keputusan	Tidak ada keputusan
$D_u < DW < 4 - d_u$	Diterima	Tidak ada autokorelasi

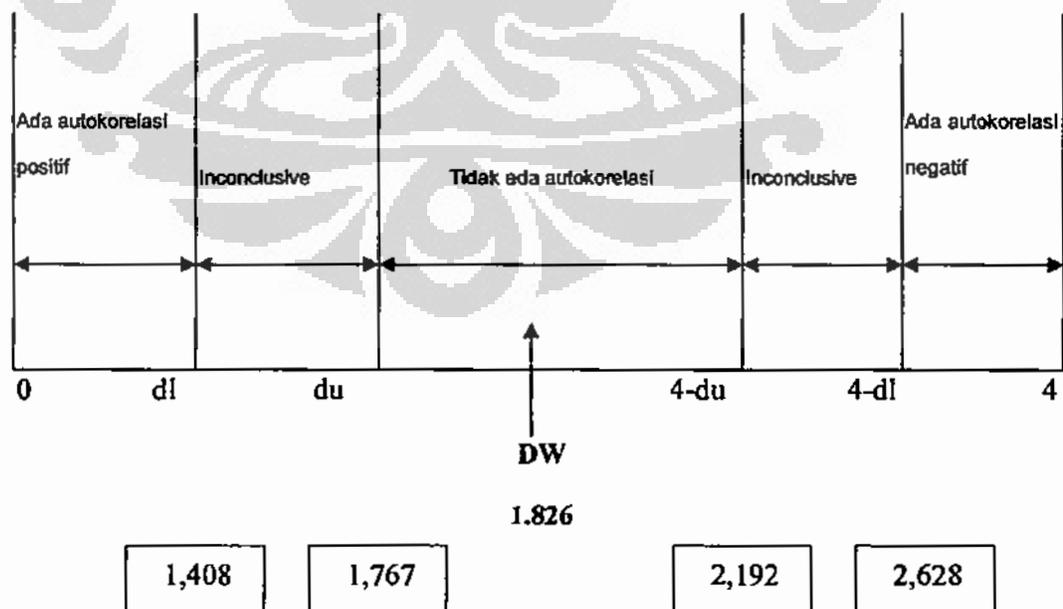
Tabel 4.6
Pengujian Autokorelasi

N	K	D _l	D _u	4 - d _u	4 - d _l	DW	Kesimpulan
61	5	1,408	1,767	2,233	2,592	1.826	Tidak Ada autokorelasi

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan Durbin Watson test dapat dinyatakan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.10
Hasil Uji Autokorelasi



Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi diatas, diketahui model regresi yang digunakan berada pada daerah tidak ada autokorelasi, karena nilai DW sebesar 1.826. Dengan demikian berarti model regresi telah bebas dari autokorelasi.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Koefisien Determinasi (*Goodness of fit*)

Koefisien Determinasi (*Goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel Determinasi tersebut dapat kita lihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.526 ^a	.277	.211	3665629.35	1.826

a. Predictors: (Constant), Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYD2

b. Dependent Variable: Pembiayaan2

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Nilai R^2 (*Adjusted R Square*) pada Tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai 0,211, hal ini berarti 21,1% pengungkapan Pembiayaan dapat dijelaskan oleh variasi dari ke lima independen (SWBI, NPF, ERPYD, ERDPK, SWBI, Inflasi). Sedangkan sisanya sebesar 78,9% dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian.

4.2.3.2 Uji Secara simultan

Untuk pengujian secara simultan/keseluruhan variabel dapat dilihat dari Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3E+014	5	5.651E+013	4.205	.003 ^a
	Residual	7E+014	55	1.344E+013		
	Total	1E+015	60			

a. Predictors: (Constant), Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYD2

b. Dependent Variable: Pembiayaan2

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dari output regresi di atas kita dapat melihat apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Begitu juga kita dapat menguji secara parsial pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya karena nilai sig ($0,003 \leq \alpha (0,05)$), maka secara simultan variabel SWBI, NPF, ERPYD, ERDPK dan Inflasi berpengaruh terhadap nilai Pembiayaan

4.2.3.3 Signifikansi Koefisien Regresi

Hasil analisis regresi yang menunjukkan signifikansi model regresi dalam memberikan dasar untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian untuk setiap variabel independen dan juga signifikansi koefisien antar variabel, dapat dilakukan dengan menggunakan *Software SPSS 13.00* sebagai berikut:

Keputusannya adalah sebagai berikut :

Jika signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak

Jika signifikansi > 0.05 , maka H_0 gagal ditolak

Tabel 4.9

Analisa Regresi Berganda

Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Regresi	Signifikan	Keputusan
NPF → Pembiayaan	200000000	.003	Tolak H_0
ERPVD → Pembiayaan	100000000	.084	Gagal tolak H_0
ERDPK → Pembiayaan	-70000000	.167	Gagal tolak H_0
SWBI → Pembiayaan	1.644	.049	Tolak H_0
INFLASI → Pembiayaan	-40000000	.076	Gagal tolak H_0

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Dari Tabel 4.9 diatas maka dapat kita ambil keputusan variabel-variabel yang signifikan yang bisa dijadikan model regresi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia adalah :

1. Hipotesis Pertama

NPF terhadap Pembiayaan

H_0 : NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

H_a : NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan

Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan *p-value* $0,003 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Artinya bahwa NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan. Adapun besarnya nilai koefisien regresi dari NPF terhadap pembiayaan adalah sebesar 200000000 yang dapat dipahami bahwa setiap kenaikan 1 NPF satuan akan

berpengaruh terhadap kenaikan pada nilai pembiayaan sebesar 200000000 satuan. Sehingga variabel NPF bisa digunakan untuk menganalisis pembiayaan.

2. Hipotesis kedua

ERPYPD terhadap Pembiayaan

H_0 : ERPYPD tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

H_a : ERPYPD pensiun berpengaruh terhadap Pembiayaan

Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa ERPYPD berpengaruh terhadap Pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan *p-value* $0,084 > 0,05$, sehingga H_0 gagal ditolak. Artinya bahwa ERPYPD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan. Keputusannya variabel ERPYPD tidak perlu digunakan untuk menganalisis pembiayaan.

3. Hipotesis Ketiga

ERDPK terhadap Pembiayaan

H_0 : ERDPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

H_a : ERDPK pensiun berpengaruh terhadap Pembiayaan

Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa ERDPK berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan *p-value* $0,167 > 0,05$, sehingga H_0 gagal ditolak. Artinya bahwa ERDPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sehingga variabel tersebut tidak perlu digunakan untuk menganalisis pembiayaan.

4. Hipotesis Keempat

SWBI terhadap Pembiayaan

Ho : SWBI tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

Ha : SWBI pensiun berpengaruh terhadap Pembiayaan

Hipotesis yang keempat menyatakan bahwa SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan *p-value* $0,049 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Artinya bahwa SWBI berpengaruh terhadap Pembiayaan. Adapun besarnya nilai koefisien regresi dari SWBI terhadap pembiayaan adalah sebesar 1.644 yang dapat dipahami bahwa setiap kenaikan 1 SWBI satuan akan berpengaruh terhadap kenaikan pada nilai pembiayaan sebesar 1.644 satuan. Sehingga keputusannya adalah variabel SWBI dapat digunakan untuk menganalisis pembiayaan.

5. Hipotesis Kelima

Inflasi terhadap Pembiayaan

Ho : Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

Ha : Inflasi pensiun berpengaruh terhadap Pembiayaan

Hipotesis yang kelima menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan *p-value* $0,076 > 0,05$, sehingga H_0 gagal ditolak. Artinya bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sehingga variabel tersebut tidak perlu digunakan untuk menganalisis pembiayaan pada penelitian ini.

Sedangkan nilai konstanta juga tidak signifikan terhadap pembiayaan yang terlihat dari nilai signifikansinya yang sebesar $0.872 > 0.05$.

4.3. Interpretasi / Evaluasi Koefisien Hasil Multiple Linier Regression

Dari hasil pengolahan dan pengujian terhadap variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dapat diperoleh model persamaan *Multiple Linier Regressi*nya yaitu :

$$\text{Pembiayaan}_2 = 200000000 \text{ NPF}_2 + 1.644 \text{ SWBI}_2 \dots\dots\dots(1)$$

Dari proses dalam mengatasi autokorelasi kita memperoleh persamaan yaitu :

$$\text{Pembiayaan}_2 = \text{Pembiayaan}_t - 0.581 \text{ Pembiayaan}_{t-1} \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{NPF}_2 = \text{NPF}_t - 0.581 \text{ NPF}_{t-1} \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{SWBI}_2 = \text{SWBI}_t - 0.581 \text{ SWBI}_{t-1} \dots\dots\dots(4)$$

Bila persamaan (2),(3) dan (4) kita gabungkan ke persamaan 1 sehingga diperoleh :

$$\text{Pembiayaan}_t - (0.581 \text{ Pembiayaan}_{t-1}) = 200000000(\text{NPF}_t - (0.581 \text{ NPF}_{t-1})) + 1.644(\text{SWBI}_t - (0.581 \text{ SWBI}_{t-1})) \dots\dots\dots(5)$$

atau

$$\text{Pembiayaan}_t = 0.581 \text{ Pembiayaan}_{t-1} + 200000000(\text{NPF}_t - (0.581 \text{ NPF}_{t-1})) + 1.644(\text{SWBI}_t - (0.581 \text{ SWBI}_{t-1})) \dots\dots\dots(6)$$

atau

$$\text{Pembiayaan}_t = 0.581 \text{ Pembiayaan}_{t-1} + 200000000 \text{ NPF}_t - 116200000 \text{ NPF}_{t-1} + 1.644 \text{ SWBI}_t - 0.955 \text{ SWBI}_{t-1} \dots\dots\dots(7)$$

Interpretasi dari hasil regresi model diatas secara statistik dan ekonomi kita akan menganalisa dari persamaan (1) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap kenaikan penempatan dana perbankan syariah di SWBI sebesar Rp.1 maka akan mengakibatkan naiknya pembiayaan sebesar Rp.1.644 juta. Secara umum dari persamaan (1) terlihat SWBI berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal

ini sesuai dengan Gambar 4.1 diatas dimana terlihat pergerakan nilai dari SWBI dengan pembiayaan cenderung meningkat bersamaan. Hal ini disebabkan karena penyimpanan kelebihan kas di SWBI masih kurang begitu menarik bagi perbankan syariah untuk saat ini sehingga malahan perbankan syariah lebih suka menyalurkannya ke pembiayaan karena akan memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi. (LPPS BI, 2008, 77) Adanya pengganti SWBI dengan SBI syariah yang tingkat bonus yang diberikan lebih tinggi ternyata belum begitu berpengaruh bagi perbankan syariah untuk menyimpan dananya di SBIS. Dengan demikian terlihat perbankan syariah masih fokus ke pembiayaan atau peran intermediasi perbankan syariah masih sangat tinggi. Meningkatnya pencairan pembiayaan serta terjadinya keketatan likuiditas pada perbankan konvensional akibat tingginya pertumbuhan kredit ditahun 2007 dan 2008 semakin mendorong turunnya penempatan bank syariah pada SBIS yang terus berlanjut sampai dengan pertengahan Oktober 2008.

2. Setiap kenaikan NPF bulan ini sebesar 1% maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp.200,000,000 juta . Secara umum bila kita gunakan persamaan (1) terlihat NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Guna mengimbangi NPF yang makin naik maka perbankan dalam hal ini akan meningkatkan penyaluran pembiayaannya yang berkualitas (golongan 1 dan 2) karena akan menyebabkan NPF bisa kembali turun karena NPF tersebut adalah nilai pembiayaan yang dikategorikan bermasalah (golongan 3,4 dan 5) berbanding dengan jumlah total pembiayaan yang diberikan. Sehingga semakin tinggi total pembiayaan yang lancar maka rasio NPF akan semakin kecil. Akibatnya berpengaruh pada kenaikan Penyaluran pembiayaan.

Menurut Laporan Bank Indonesia (2008, 32) masih tinggi penyaluran pembiayaan juga disebabkan karena membaiknya kualitas pembiayaan bermasalah yang disebabkan yang proses write off, restrukturisasi dan take over pembiayaan bermasalah oleh bank konvensional. Kualitas pembiayaan perbankan syariah mampu dijaga dalam rasio yang relatif rendah. Sehingga adanya peningkatan NPF masih bisa diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan.

3. Tingkat bagihasil dan margin pembiayaan terlihat masih tidak berpengaruh pada penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan permintaan

masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan perbankan syariah masih tinggi dan dengan *equivalent rate* pembiayaan yang relatif stabil pada periode penelitian membuat pengaruhnya tidak signifikan terhadap keputusan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya ke masyarakat.

4. Demikian pula halnya dengan *equivalent rate* dana pihak ketiga juga tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan karena disamping tingkat bagi hasil DPK masih terlihat stabil juga karena keuntungan perbankan syariah tidak terlalu berpengaruh terhadap bagi hasil yang dibagikan ke masyarakat karena tingkat bagi hasil DPK tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perbankan, dimana semakin tinggi keuntungan bank maka tingkat bagi hasil yang dibagikan ke pihak penabung/investor juga akan semakin tinggi demikian juga jika keuntungan perbankan syariah rendah maka keuntungan yang dibagikan ke penabung/investor juga rendah (Prinsip *Profit and Loss Sharing*).
5. Sementara itu tingkat Inflasi pada masa penelitian ternyata juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Hal ini menunjukkan perbankan syariah ternyata tetap menyalurkan pembiayaannya sebagai lembaga intermediasi yang baik tanpa terpengaruh oleh gejolak inflasi yang terjadi di Indonesia dan dapat bertahan meskipun dalam menghadapi inflasi yang berfluktuasi dan krisis ekonomi global.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari proses dalam penelitian ini penulis menemukan sejumlah temuan yang dapat dijadikan sebagai simpulan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Rumusan masalah dengan demikian sudah dapat terjawab secara jelas. Fakta-fakta tersebut menjadi jawaban dan bagian akhir atas pertanyaan awal pada rumusan masalah di saat penyusunan penelitian. Simpulan yang telah didapat dalam penelitian dapat diuraikan di bawah ini:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau sekarang bernama SBIS sehingga kedua variabel tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dan otoritas moneter serta manajemen perbankan syariah dalam menjalankan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
2. Pengaruh NPF ternyata berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia. Artinya setiap kenaikan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah akan menyebabkan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah akan makin naik. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah guna mengimbangi NPF yang makin naik dalam kebijakan pembiayaannya salah satu caranya agar porsi NPF turun adalah dengan meningkatkan penyaluran pembiayaannya yang berkualitas (golongan 1 dan 2) karena akan menyebabkan NPF bisa kembali turun karena NPF tersebut adalah nilai pembiayaan yang dikategorikan bermasalah (golongan 3,4 dan 5) berbanding dengan jumlah total pembiayaan yang

diberikan. Sehingga semakin tinggi total pembiayaan yang lancar maka rasio NPF akan semakin kecil. Akibatnya berpengaruh pada kenaikan Penyaluran pembiayaan.

Sedangkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ternyata juga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia hal itu sesuai dengan data yang ada dimana pergerakan SWBI cenderung mengikuti peningkatan pembiayaan. Kenaikan jumlah alokasi pembiayaan perbankan syariah karenanya sangat dipengaruhi oleh SWBI. Semakin tinggi bonus SWBI maka akan semakin tinggi jumlah alokasi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia ke masyarakat. Hal itu kemungkinan disebabkan karena SWBI pada saat ini masih kurang menarik bagi perbankan syariah sehingga dengan naiknya SWBI malahan pembiayaan makin banyak disalurkan guna mencari keuntungan yang lebih baik sedangkan dengan adanya penggantian SWBI menjadi SBIS di tahun 2008 belum begitu mempengaruhi perbankan syariah untuk mengurangi penyaluran pembiayaannya ke sektor riil.

5.2 Saran

Hasil dari penelitian dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ini bersifat kondisional karena faktor-faktor yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Dari fakta-fakta yang ditemukan maka dapat ditarik sebuah implikasi teoritis darinya yaitu :

1. Jika pemerintah dan Bank Indonesia ingin mempercepat dan mengoptimalkan perkembangan penyaluran perbankan syariah maka bonus SWBI/SBIS saat ini harus bisa lebih menarik lagi sehingga perbankan syariah tidak perlu ragu atau cemas mengalami kelebihan likuiditas dari dana yang terkumpulkan dari masyarakat karena dapat menjaga agar perbankan tetap dapat memberikan bagi hasil yang menarik bagi masyarakat yang menyimpan dananya di perbankan syariah dan kelebihan likuiditas tersebut bisa di simpan sementara waktu di SWBI/SBIS sambil menunggu

penyaluran dana ke sektor riil/masyarakat dapat direalisasikan atau dengan kata lain SWBI/SBIS sebagai alternatif investasi yang sifatnya jangka pendek bagi perbankan syariah. Namun bonus SWBI tersebut jangan terlalu tinggi yang bisa menyebabkan perbankan lebih menyukai menyimpan dananya di SWBI/SBIS dibanding penyaluran ke masyarakat. Sehingga dengan makin banyaknya dana pihak ketiga yang bisa dikumpulkan oleh perbankan syariah maka kapasitas perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat dan sektor riil akan makin lebih meningkat lagi.

2. Demikian juga halnya perlunya kerjasama antara perbankan syariah dan pengawasan Bank Indonesia agar tingkat NPF tidak terlalu tinggi karena akan bisa berpengaruh negative terhadap pembiayaan walaupun saat penelitian kenaikan NPF membuat pembiayaan juga naik. Sedangkan bagi perbankan syariah harus tetap meningkatkan penyaluran pembiayaan yang berkualitas dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga porsi pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil.

5.3 Saran untuk penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah hendaknya mencoba menggunakan kurun waktu yang lebih lama dan variabel yang diteliti agar ditambah lagi serta di perluas aspek-aspek yang akan diteliti sehingga bisa memberikan masukan yang lebih akurat bagi pengambil keputusan dalam kebijakan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia serta agar perkembangan ilmu pengetahuan makin bertambah maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, H.M. Syafi'i M.Sc. *Produk Syariah dan kemungkinan Penerapannya dalam sistem Perbankan Islam*, Paper, International Islamic University, Malaysia
- Asy'ari, Mohamad Hasyim, 2004, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah*, Tesis, Pascasarjana PSKTTI Universitas Indonesia, Jakarta
- Aziz, H.M. Amin. 1992 *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit,
- Bank Indonesia, 2008, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta
- Bank Indonesia, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Capra, Umer M. 2000, *Sistem Moneter Islam*. Edisi terjemahan. Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Ghozali, Imam, Prof, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hakim, A. ,2000, *Statistik Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Kasmir 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada,
- Khalwaty, T. 2001, *Inflasi Dan Solusinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2001, *Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Lathif, Ahmad Fahrizal, 2008, *Analisis Fungsi Intermediasi Bank syariah di Indonesia periode 2004.1-2006.12*, Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Moh. Nazir Ph. D, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, H.M. Syafi'i M.Sc. *Produk Syariah dan kemungkinan Penerapannya dalam sistem Perbankan Islam*, Paper, International Islamic University, Malaysia
- Asy'ari, Mohamad Hasyim, 2004, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah*, Tesis, Pascasarjana PSKTTI Universitas Indonesia, Jakarta
- Aziz, H.M. Amin. 1992 *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit,
- Bank Indonesia, 2008, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta
- Bank Indonesia, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Capra, Umer M. 2000, *Sistem Moneter Islam*. Edisi terjemahan. Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Ghozali, Imam, Prof, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hakim, A. ,2000, *Statistik Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Kasmir 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada,
- Khalwaty, T. 2001, *Inflasi Dan Solusinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2001, *Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Lathif, Ahmad Fahrizal, 2008, *Analisis Fungsi Intermediasi Bank syariah di Indonesia periode 2004.1-2006.12*, Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Moh. Nazir Ph. D, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Novianto, Abdulah Syakur, 2008, *Analisis Pengaruh DPK, SWBI, NPF dan Inflasi terhadap perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2005 - Desember 2007*, Tesis Pascasarjana (dipublikasikan), Universitas Airlangga, Surabaya
- Siregar, Nurhayati, 2004, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia*, Tesis (dipublikasikan), Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Setyowati, Desty, 2008, *Indikasi Moral Hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2003:1-2007:9)*, Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Siamat, Dahlan, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Singgih Santoso, 2006, *Buku Latihan Statistik Parametrik*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Sujati, Condro.W ,2007, *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi alokasi kuk pada bank-bank umum di Indonesia (pada tahun 2004:02-2005:12)*, Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Syafii, Antonio,2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Isani Press, Jakarta
- Totok, B. dan Sigit, T. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2 Salemba Empat, Jakarta.
- Umar Sekaran, 1984, *Research Methods for Business*, Southern Illinois University at Carbondale
- Usman H dan Mustafa Edwin, 2007, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Usman H dan Nachrowi, 2006, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Widarjono, Agus , 2005, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk ekonomi dan bisnis*,

Referensi Non- buku:

Bank Indonesia, 2005, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*

www.bi.go.id

Peraturan BI N0 8 tahun 2006 tentang pembukaan layanan syariah pada counter – counter unit konvensional Bank

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, *BI 2007*

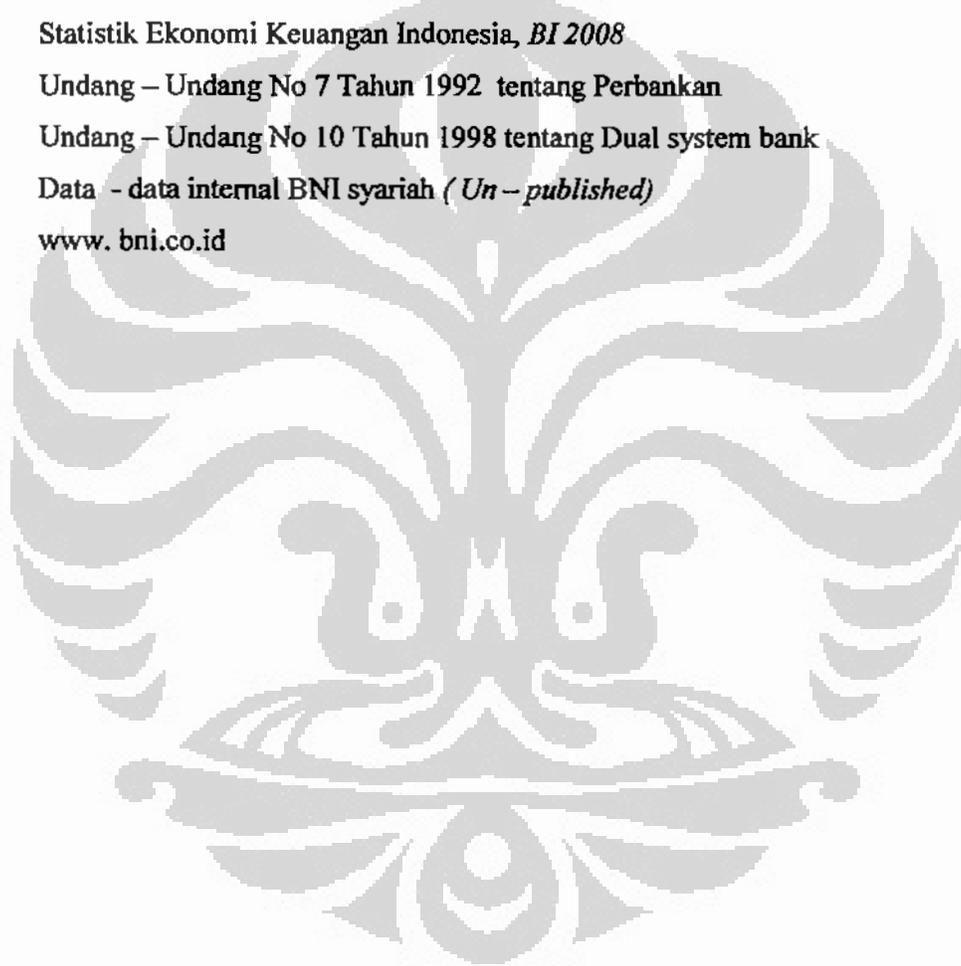
Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, *BI 2008*

Undang – Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tentang Dual system bank

Data - data internal BNI syariah (*Un – published*)

www.bni.co.id



Lampiran 1
DATA PENELITIAN

Bulan	Pembiayaan	NPF	ERPYD	ERDPK	SWBI	Inflasi
March-04	7022808	0.03	0.14	0.06	1567050	0.05
April-04	7381724	0.02	0.15	0.07	1250150	0.15
May-04	7551949	0.02	0.15	0.06	875900	0.06
June-04	8356100	0.02	0.15	0.07	443500	0.07
July-04	8859500	0.03	0.15	0.07	603000	0.08
August-04	9541803	0.03	0.14	0.06	539700	0.09
September-04	10131051	0.03	0.14	0.06	415000	0.09
October-04	10683381	0.03	0.14	0.07	368500	0.11
November-04	10978618	0.03	0.15	0.07	447000	0.12
December-04	11489933	0.02	0.15	0.07	1093500	0.12
January-05	11665192	0.03	0.14	0.06	882500	0.12
February-05	12139325	0.03	0.14	0.07	628000	0.12
March-05	12959341	0.03	0.13	0.07	486950	0.12
April-05	13484151	0.03	0.13	0.05	449100	0.11
May-05	14014678	0.03	0.13	0.06	600000	0.10
June-05	14270381	0.04	0.12	0.06	549500	0.09
July-05	14449695	0.04	0.13	0.06	439000	0.08
August-05	14772601	0.04	0.12	0.06	359500	0.07
September-05	14753299	0.05	0.12	0.12	506500	0.07
October-05	15121483	0.04	0.12	0.11	317000	0.07
November-05	14959224	0.04	0.13	0.06	532000	0.07
December-05	15231942	0.03	0.12	0.06	2394900	0.07
January-06	15042197	0.04	0.12	0.06	2156000	0.07
February-06	15366770	0.04	0.12	0.06	1621000	0.07
March-06	15996948	0.04	0.12	0.06	1148300	0.06
April-06	16589770	0.04	0.12	0.06	1171300	0.06
May-06	17366873	0.04	0.12	0.06	1091800	0.06
June-06	18162126	0.04	0.12	0.06	1188000	0.06
July-06	18527228	0.05	0.12	0.06	871500	0.07
August-06	19037592	0.05	0.12	0.07	1117000	0.06
September-06	19662542	0.05	0.12	0.06	1045700	0.06
October-06	20087984	0.05	0.12	0.06	1190400	0.07
November-06	20391420	0.05	0.12	0.06	1546650	0.05
December-06	20444907	0.05	0.12	0.06	2356900	0.06
January-07	20218546	0.05	0.13	0.06	2663400	0.15
February-07	20462749	0.06	0.13	0.06	3001000	0.15
March-07	20820064	0.06	0.15	0.06	3325450	0.15
April-07	21353493	0.06	0.15	0.06	3165550	0.16
May-07	21920019	0.06	0.15	0.06	2801200	0.16
June-07	22969103	0.06	0.15	0.05	2036000	0.15

Lampiran 2
DATA PENELITIAN

July-07	23687318	0.07	0.14	0.05	1555000	0.16
August-07	24637850	0.07	0.14	0.05	982700	0.18
September-07	25589806	0.06	0.14	0.05	1310900	0.17
October-07	26148752	0.06	0.14	0.05	1761100	0.17
November-07	26548228	0.06	0.14	0.05	1643600	0.18
December-07	27944311	0.04	0.14	0.05	2598500	0.18
January-08	26215044	0.04	0.14	0.05	2999200	0.09
February-08	27289677	0.04	0.15	0.05	3716750	0.08
March-08	29628028	0.04	0.15	0.05	2134950	0.08
April-08	29802027	0.04	0.15	0.05	2496102	0.07
May-08	32293151	0.05	0.14	0.05	1597100	0.07
June-08	34099667	0.04	0.14	0.05	1751300	0.08
July-08	35189987	0.04	0.14	0.05	818400	0.09
August-08	36571761	0.04	0.14	0.05	350400	0.07
September-08	37897997	0.04	0.14	0.05	365800	0.07
October-08	38097341	0.04	0.14	0.05	501400	0.06
November-08	38528984	0.05	0.14	0.06	1013900	0.06
December-08	38194974	0.04	0.14	0.06	2545300	0.06
January-09	38200804	0.04	0.14	0.06	3488400	0.06
February-09	38842908	0.05	0.14	0.06	3191900	0.07
March-09	39307689	0.05	0.14	0.05	2704000	0.07
April-09	39725557	0.05	0.14	0.06	2057600	0.07

Lampiran 3

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi, Dana pihak ketiga, Equivalent rate PYD, Equivalent rate DPK, SWBI, Non Performing Financing (Gross)		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998 ^a	.996	.996	621526.075	.768

- a. Predictors: (Constant), Inflasi, Dana pihak ketiga, Equivalent rate PYD, Equivalent rate DPK, SWBI, Non Performing Financing (Gross)
 b. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6E+015	6	9.562E+014	2475.382	.000 ^a
	Residual	2E+013	55	3.863E+011		
	Total	6E+015	61			

- a. Predictors: (Constant), Inflasi, Dana pihak ketiga, Equivalent rate PYD, Equivalent rate DPK, SWBI, Non Performing Financing (Gross)
 b. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

Lampiran 4

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3170295	1459417		2.172	.034		
	Dana pihak ketiga	1.087	.014	1.050	80.499	.000	.394	2.538
	Non Performing Financing (Gross)	1E+007	1E+007	.018	1.421	.161	.408	2.450
	Equivalent rate PYD	-2E+007	9892188	-.022	-1.970	.054	.524	1.909
	Equivalent rate DPK	-1618661	7637551	-.002	-.212	.833	.744	1.344
	SWBI	-1.199	.102	-.119	-11.798	.000	.657	1.522
	Inflasi	-3568202	2973893	-.014	-1.200	.235	.460	2.174

a. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

Collinearity Diagnostics

Mode	Dimensio	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions						
				Constant	Dana pihak ketiga	Non Performing Financing (Gross)	Equivalent rate PYD	Equivalent rate DPK	SWBI	Inflasi
1	1	6.426	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.287	4.732	.00	.03	.00	.00	.02	.39	.01
	3	.139	6.803	.00	.14	.00	.00	.01	.12	.27
	4	.094	8.289	.00	.20	.03	.00	.07	.48	.11
	5	.039	12.858	.00	.13	.54	.01	.01	.00	.10
	6	.014	21.298	.04	.39	.09	.05	.82	.00	.24
	7	.002	63.022	.96	.11	.35	.93	.07	.01	.28

a. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

Lampiran 5

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5705734	4E+007	2E+007	9698200.795	62
Std. Predicted Value	-1.605	2.032	.000	1.000	62
Standard Error of Predicted Value	134402.3	434750.8	202101.8	53048.596	62
Adjusted Predicted Value	5432434	4E+007	2E+007	9696980.044	62
Residual	-1483227	1453109	.00000	590168.16703	62
Std. Residual	-2.386	2.338	.000	.950	62
Stud. Residual	-2.498	2.483	.004	1.012	62
Deleted Residual	-1624691	1639305	4955.295	671265.67024	62
Stud. Deleted Residual	-2.628	2.611	.008	1.038	62
Mahal. Distance	1.869	28.863	5.903	4.288	62
Cook's Distance	.000	.174	.020	.037	62
Centered Leverage Value	.031	.473	.097	.070	62

a. Dependent Variable: Pembiayaan Yang Diberikan

Regression

Variables Entered/Removed^{b,c}

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LAGRES2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

c. Linear Regression through the Origin

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	LAGRES2	.581	.104	.584	5.568	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Linear Regression through the Origin

Lampiran 6

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYP2, DPK2 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pembiayaan2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.994 ^a	.989	.987	462396.215	1.865

a. Predictors: (Constant), Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYP2, DPK2

b. Dependent Variable: Pembiayaan2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1E+015	6	1.683E+014	787.318	.000 ^a
	Residual	1E+013	54	2.138E+011		
	Total	1E+015	60			

a. Predictors: (Constant), Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYP2, DPK2

b. Dependent Variable: Pembiayaan2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	901134.1	647672.5		1.391	.170		
	DPK2	1.095	.019	1.062	58.331	.000	.632	1.583
	NPF2	9645735	9741300	.016	.990	.326	.817	1.224
	ERPYP2	-2E+007	1E+007	-.026	-1.583	.119	.775	1.291
	ERDPK2	1737252	6064150	.004	.286	.776	.936	1.068
	SWBI2	-1.242	.114	-.177	-10.846	.000	.783	1.277
	Inflasi2	1887509	2622386	.012	.720	.475	.812	1.231

a. Dependent Variable: Pembiayaan2

Lampiran 7

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions						
				(Constant)	DPK2	NPF2	ERPYD2	ERDPK2	SWBI2	Inflasi2
1	1	6.005	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.00
	2	.445	3.674	.00	.01	.00	.00	.02	.63	.03
	3	.246	4.940	.00	.04	.02	.00	.02	.06	.68
	4	.161	6.105	.00	.16	.08	.00	.43	.15	.03
	5	.084	8.439	.00	.21	.77	.01	.01	.11	.01
	6	.054	10.587	.04	.55	.00	.04	.46	.05	.14
	7	.005	36.315	.96	.03	.12	.95	.05	.00	.10

a. Dependent Variable: Pembiayaan2

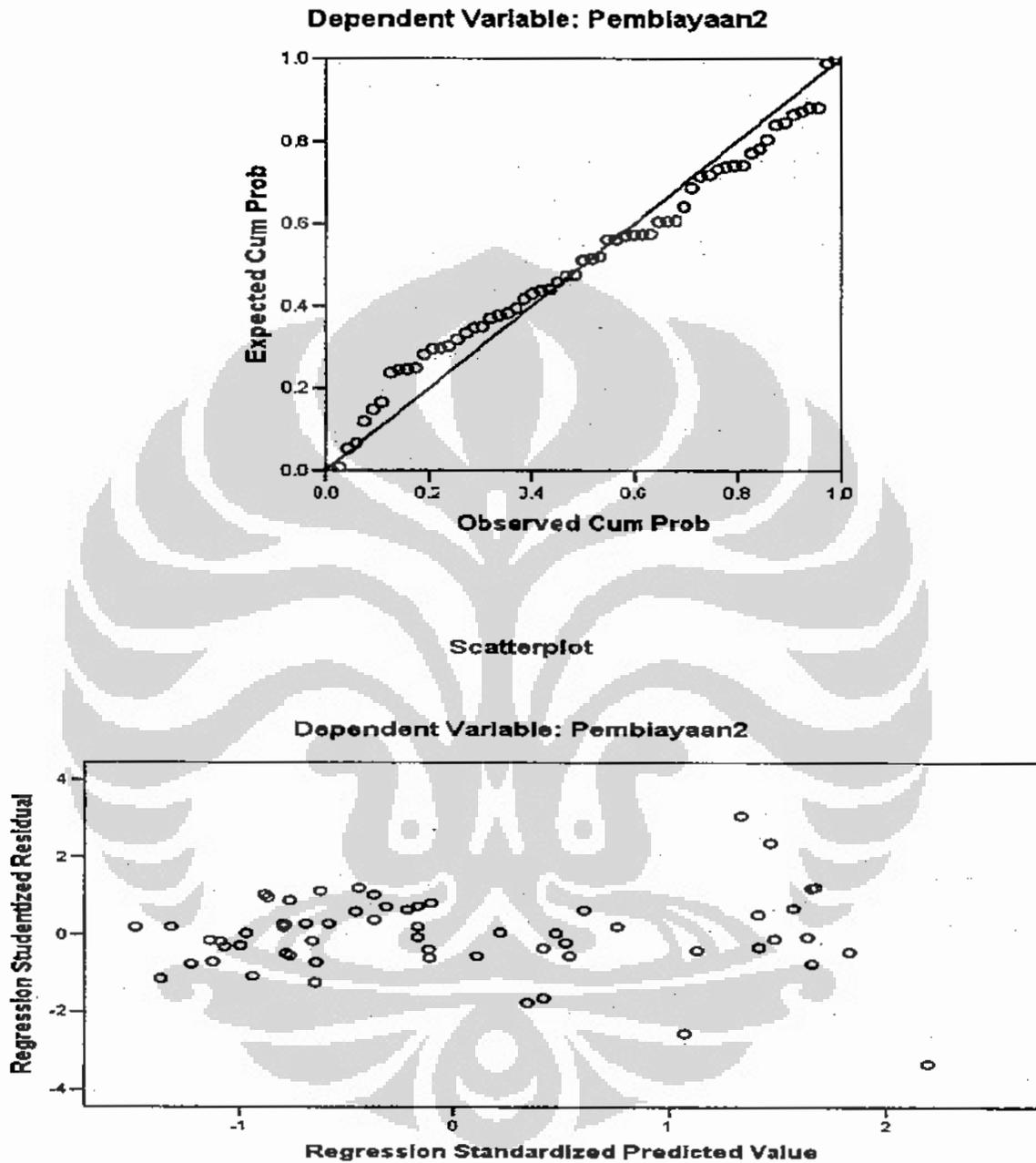
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3230040	2E+007	9321063	4102884.810	61
Std. Predicted Value	-1.485	2.194	.000	1.000	61
Standard Error of Predicted Value	88017.609	367509.7	148398.9	50549.438	61
Adjusted Predicted Value	3194250	2E+007	9320060	4107266.007	61
Residual	-1436309	1335495	.00000	438667.56652	61
Std. Residual	-3.106	2.888	.000	.949	61
Stud. Residual	-3.333	3.063	.000	1.007	61
Deleted Residual	-1654012	1502398	1003.373	495309.04652	61
Stud. Deleted Residual	-3.705	3.339	-.002	1.054	61
Mahal. Distance	1.190	36.918	5.902	5.638	61
Cook's Distance	.000	.241	.019	.041	61
Centered Leverage Value	.020	.615	.098	.094	61

a. Dependent Variable: Pembiayaan2

Lampiran 8

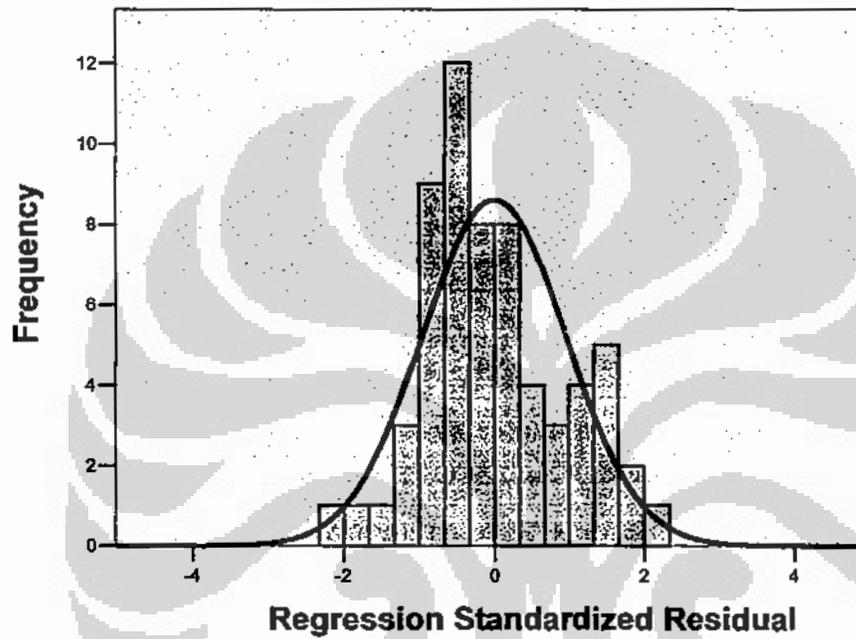
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 9

Histogram

Dependent Variable: Pembiayaan2



Lampiran

Uji Glejser

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYP2 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABSRES2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.360 ^a	.129	.050	359364.404

a. Predictors: (Constant), Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYP2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1E+012	5	2.108E+011	1.633	.167 ^a
	Residual	7E+012	55	1.291E+011		
	Total	8E+012	60			

a. Predictors: (Constant), Inflasi2, ERDPK2, SWBI2, NPF2, ERPYP2

b. Dependent Variable: ABSRES2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-793653.691	502829.9		-1.578	.120
	NPF2	349699.474	7026691	.006	.050	.960
	ERPYP2	21795926.2	8110960	.371	2.687	.095
	ERDPK2	4548024.16	4625319	.125	.983	.330
	SWBI2	-.025	.080	-.040	-.308	.759
	Inflasi2	-2827292.0	1973364	-.194	-1.433	.158

a. Dependent Variable: ABSRES2